

# RENCANA INDUK TIK (RITIK) KOTA PALANGKA RAYA



**PALANGKA RAYA**  
2019

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Palangka Raya telah dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah mempercayakan pembuatan Dokumen Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini kepada Tim LPPM Universitas Palangka Raya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya atas dukungan secara maksimal atas terselenggaranya Pekerjaan Penyusunan Dokumen Master Plan TIK Kota Palangka Raya

Demikian, semoga Dokumen Master Plan TIK Kota Palangka Raya yang kami sajikan ini dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Penyusun

Tim LPPM UPR

## DAFTAR ISI

COVER PAGE.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.2.1 Maksud .....	2
1.2.2 Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum .....	3
1.4 Metodologi Penyusunan Master Plan .....	3
1.4.1 Metode Pengumpulan Data .....	4
1.4.2 Metode Penyusunan Master Plan TIK .....	5
BAB II PROFIL KOTA PALANGKA RAYA .....	7
2.1 Letak Geografis .....	7
2.2 Visi Kota Palangka Raya .....	7
2.3 Misi Kota Palangka Raya .....	10
2.4 Tujuan dan Sasaran .....	10
BAB III ANALISA KONDISI DAN KEBUTUHAN TIK .....	12
3.1 Kondisi Eksisting .....	12
3.1.1 Kondisi Infrastruktur dan Perangkat Keras .....	12
3.1.2 Kondisi Eksisting Penggunaan Aplikasi ( <i>Software</i> ) .....	15
3.1.3 Kondisi Eksisting Sumber Daya Manusia .....	18
3.1.4 Diseminasi data dan kebijakan IT .....	20
3.2 Kondisi Yang Ingin Dicapai .....	21
3.2.1 Kelembagaan .....	22
3.2.2 Hukum dan Kebijakan .....	23
3.2.3 Perangkat Lunak .....	24
3.2.4 Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras .....	32
3.2.5 Sumber Daya Manusia .....	34
3.3 Analisa Gap (Identifikasi Kebutuhan) .....	39
3.3.1 Kondisi Kelembagaan dan Kebijakan .....	39
3.3.2 Kondisi Sistem Informasi dan Aplikasi .....	40
3.3.3 Kondisi Perangkat Keras dan Infrastruktur .....	42

3.3.4	Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM).....	44
3.4	Analisa SWOT .....	51
<b>BAB IV REKOMENDASI DAN ROAD MAP PENGEMBANGAN TIK .....</b>		<b>54</b>
4.1	Rekomendasi dan Rencana Strategis.....	54
4.2	Roadmap Implementasi .....	58
4.2.1	Infrastruktur TIK .....	59
4.2.2	Perangkat Lunak dan Aplikasi Sistem Informasi .....	61
4.2.3	Sumber Daya Manusia .....	63
4.2.4	Tata Kelola TIK .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>65</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya .....	9
Gambar 3.1 Jumlah komputer/laptop yang terhubung dan tidak terhubung dengan internet di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya .....	13
Gambar 3.2 Ketersediaan jaringan LAN di masing-masing SOPD .....	14
Gambar 3.3 Status website resmi SOPD di Pemerintah Kota Palangka Raya .....	16
Gambar 3.4 Kondisi kemampuan TIK pegawai di Pemko Palangka Raya .....	18
Gambar 3.5 Distribusi kemampuan TIK pegawai Pemko Palangka Raya .....	19
Gambar 3.6 Topologi Jaringan Pemerintah Kota Palangka Raya .....	34
Gambar 4.1 Roadmap Implementasi Pengembangan TIK Kota Palangka Raya .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Lokasi dan spesifikasi server di lingkungan Pemko Palangka Raya.....	15
Tabel 3.2 Kebutuhan aplikasi baru dari tiap SOPD .....	17
Tabel 3.3 SOPD yang memiliki staf khusus terkait TIK .....	19
Tabel 3.4 Taksonomi Blok Fungsi dan Modul Aplikasi e-Government (Depkominfo, 2004) .....	25
Tabel 3.5 Kebutuhan Pegawai Pemkot Palangka Raya Secara Umum .....	35
Tabel 3.6 Kebutuhan pengelola perangkat keras dan jaringan .....	35
Tabel 3.7 Kebutuhan Pembangun dan Pengelola perangkat lunak .....	36
Tabel 3.8 Kebutuhan Pegawai di Level manajerial pengelola TIK.....	37
Tabel 3.9 Analisa gap kelembagaan dan kebijakan.....	39
Tabel 3.10 Analisa gap sistem informasi dan aplikasi .....	41
Tabel 3.11 Analisa gap perangkat keras dan infrastruktur .....	42
Tabel 3.12 Analisa gap sumber daya manusia .....	44
Tabel 3.13 Kondisi dan kebutuhan akan perangkat lunak di SOPD .....	46
Tabel 3.14 Analisis SWOT.....	51
Tabel 3.15 Analisa strategis SWOT .....	53
Tabel 4.1 Strategi Implementasi Master Plan TIK Kota Palangka Raya .....	55
Tabel 4.2 Roadmap Infrastruktur TIK.....	60
Tabel 4.3 Roadmap Perangkat Lunak dan Aplikasi Sistem Informasi.....	61
Tabel 4.4 Roadmap Sumber Daya Manusia .....	63
Tabel 4.5 Roadmap Tata Kelola TIK .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penggunaan teknologi informasi telah berkembang sangat pesat, terutama dalam menunjang kegiatan operasional di pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kota/kabupaten. Peran teknologi informasi cukup signifikan dalam menentukan keberhasilan jalannya pemerintahan, mengingat informasi merupakan salah satu sumber daya dalam pemerintahan/organisasi yang perlu dikelola secara baik dan benar.

Kesadaran akan pentingnya fungsi pengelolaan data dan informasi dalam sistem pemerintahan/organisasi telah mengakibatkan pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumberdaya lainnya, seperti halnya sumber daya manusia, keuangan, waktu dan yang lainnya. Oleh karena itu, keberadaan teknologi dan sistem informasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, diperlukan perencanaan yang baik sangat dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan adanya perencanaan yang baik, penerapan teknologi informasi diharapkan akan dapat memberikan hasil yang seoptimal mungkin, sehingga biaya yang dikeluarkan nantinya tidak semata-mata hanya sebagai pengeluaran saja akan tetapi diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan.

Kota Palangka Raya saat ini berada di era transformasi. Pembangunan menyeluruh dilakukan di semua sektor, dimana diharapkan para pebisnis, masyarakat, pekerja, bahkan wisatawan akan

merasakan Kota Palangka Raya baru. Dalam mewujudkan konsep kota Palangka Raya baru, pemerintah Kota Palangka Raya mempunyai visi pembangunan “Terwujudnya Kota Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua” dan misi mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya berbasiskan *Smart Environment*, *Smart Society* dan *Smart Economy*.

Keberadaan dokumen Master Plan TIK akan dapat menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan terutama bagi pengambil keputusan di Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melakukan perencanaan investasi dan implementasi program kerja berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi secara internal maupun eksternal. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan dalam sistem pemerintahan, dokumen ini harus bersifat dinamis (*living document*), serta diperlukan review ataupun evaluasi secara periodik untuk tetap menjaga aktualitasnya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Maksud penyusunan Master Plan TIK Kota Palangka Raya adalah memberikan gambaran mengenai kondisi saat ini implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan kebutuhan TIK yang diharapkan untuk dapat mewujudkan tercapainya visi dan misi Kota Palangka Raya. Dengan adanya Master Plan TIK diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan investasi dan implementasi TIK baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen Master Plan ini adalah:

1. Terwujudnya sistem informasi manajemen yang terpadu di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya
2. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan TIK serta terselenggaranya pemakaian sumberdaya secara efektif dan efisien.
3. Mengembangkan acuan dalam menentukan prioritas investasi, anggaran dan rencana kerja terkait TIK.



### **1.3 Landasan Hukum**

1. Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
2. Kepmen Kominfo No 47 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknologi Komunikasi dalam Menunjang E-Government.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017 Gerakan Menuju 100 Smart City, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, 2017.
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

### **1.4 Metodologi Penyusunan Master Plan**

Penyusunan dokumen Master Plan TIK Kota Palangka Raya menggunakan pendekatan mixed method atau merupakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini diambil untuk dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap pemanfaatan TIK guna menunjang terwujudnya penerapan TIK yang maksimal dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kota Palangka Raya. Pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting pemanfaatan TIK di kota Palangka Raya. Upaya memahami pemanfaatan TIK yang dibutuhkan dan ideal dilakukan dengan melakukan studi

literatur terhadap kebijakan dan dokumen artikel/jurnal terkait dan wawancara mendalam dengan dunia usaha dan SOPD terkait pengambilan keputusan.

#### **1.4.1 Metode Pengumpulan Data**

Data yang akan dikumpulkan untuk menunjang penyusunan dokumen Master Plan TIK Kota Palangka Raya terdiri dari 2 (dua) jenis sumber, yaitu :

1. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung melalui subjek penelitian, yaitu instansi pemerintahan yaitu seluruh SOPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, termasuk 5 (lima) kecamatan di Kota Palangka Raya.
2. Data sekunder, yaitu dokumen terkait kebijakan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemko Palangka Raya, kebijakan/peraturan yang berhubungan dengan layanan masyarakat dari tiap SOPD. Data sekunder juga didapatkan dari berbagai tulisan tentang pemanfaatan TIK dalam pengembangan e-Government dan Smart City yang diperoleh dari perpustakaan umum dan bahan tulisan yang tersedia di internet.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu melakukan penggalian data dan informasi yang sudah dilakukan dalam berbagai media, dokumen dan peraturan pemerintah terkait TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
2. Observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata dari penggunaan teknologi informasi pada SOPD, diantaranya melihat web, aplikasi, atau observasi langsung ke kantor OPD. Pada saat observasi dapat dilaksanakan wawancara mendalam secara langsung dengan pengelola TIK Pemko Palangka Raya, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
3. Penyebaran dan verifikasi kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab responden. Pertanyaan dibuat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta dengan kalimat-kalimat pendek dengan maksud yang jelas. Isi kuesioner merupakan inventarisasi infrastruktur TIK beserta pendukungnya yang dibutuhkan dalam penyusunan Master Plan TIK. Dalam hal penyusunan Master Plan TIK Kota Palangka Raya, penyebaran dan verifikasi kuesioner dilaksanakan pada 37 SOPD termasuk 5 (lima) kecamatan di kota Palangka Raya.

#### **1.4.2 Metode Penyusunan Master Plan TIK**

Pada prinsipnya metode penyusunan Master Plan TIK Kota Palangka Raya mencakup antara lain:

##### **1. Analisa Terhadap Kondisi Saat ini**

Analisa terhadap kondisi saat ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi pemanfaatan TIK oleh tiap SOPD di lingkup Pemko Palangkaraya. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan analisa terhadap aplikasi bisnis yang telah ada, infrastruktur, sumber daya manusia, *computer literacy*, peraturan-peraturan (regulasi) internal yang ada dan terkait dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Analisa internal-external (SWOT) dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta kesempatan dan ancaman yang datang dari luar.

##### **2. Analisa Terhadap Kondisi Ideal**

Analisa terhadap kondisi yang diharapkan dapat diimplementasikan di Kota Palangka Raya dimaksudkan untuk menyusun kondisi atau konsep ideal penerapan TIK untuk mendukung keseluruhan sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Analisa akan difokuskan pada bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kota Palangka Raya. Dalam hal ini juga dilakukan penganalisaan terhadap kondisi internal yaitu sumber daya manusia pendukung dan peraturan internal yang terkait dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta pengaruh-pengaruh external, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri.

##### **3. Analisa Gap TIK**

Dalam kenyataannya, pasti terdapat perbedaan antara penerapan TIK yang dibutuhkan dengan penerapan TIK yang sudah berjalan pada saat ini di lingkup Pemko Palangka Raya. Gap antara kebutuhan dan ketersediaan inilah yang merupakan kunci dari penyusunan Master Plan TIK, karena pada dasarnya MP-TIK merupakan dokumen yang menggambarkan bagaimana caranya menutup gap yang dimaksud. Adapun aktivitas dalam analisa gap ini adalah melakukan komparasi antara kebutuhan dan ketersediaan, dalam hal keberadaan sistem, kinerja, fitur, kapabilitas dan hal-hal terkait lainnya. Hasil komparasi kemudian dikategorikan ke dalam

sejumlah kelompok analisa. Dalam analisa gap ini juga dipertimbangkan beberapa saran skenario dan pengembangannya untuk menutupi gap yang teridentifikasi.

#### 4. Penentuan Skala Prioritas dan Pembuatan Roadmap TIK

Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi sangatlah terbatas, sehingga untuk mengembangkan TIK yang optimal perlu dilakukan proses prioritisasi. Skala prioritas inilah yang akan menentukan sistem-sistem mana saja yang akan dikembangkan dalam horizon waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk menentukan dari sekian banyak inisiatif untuk menutupi gap antara kebutuhan dan ketersediaan yang ada, mana saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil analisa gap, penentuan skala prioritas dengan cara menentukan sistem TIK mana saja yang harus segera dikembangkan dan diterapkan (inisiatif pengembangan jangka pendek), mana saja yang dapat menunggu 2-3 tahun untuk menyusul dibangun dan diimplementasikan (inisiatif pengembangan jangka menengah), dan mana saja yang dapat dibangun serta dikembangkan di kemudian hari (inisiatif pengembangan jangka panjang) - untuk menentukan hal tersebut diperlukan sejumlah pertimbangan seperti: tingkat kepentingan, alokasi dana atau biaya pengembangan, ketersediaan sumber daya, dan lain-lain.

## **BAB II**

### **PROFIL KOTA PALANGKA RAYA**

#### **2.1 Letak Geografis**

Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73, Nomor 74, dan Nomor 75 Tahun 2013 luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (285.351,28 Ha). Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	: Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	: Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	: Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 119,41 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah 641,47 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 603,16 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Rakumpit dengan luas wilayah 1.101,95 Km<sup>2</sup>.

Gambar 2.1 menunjukkan Peta Administrasi Kota Palangka Raya.

#### **2.2 Visi Kota Palangka Raya**

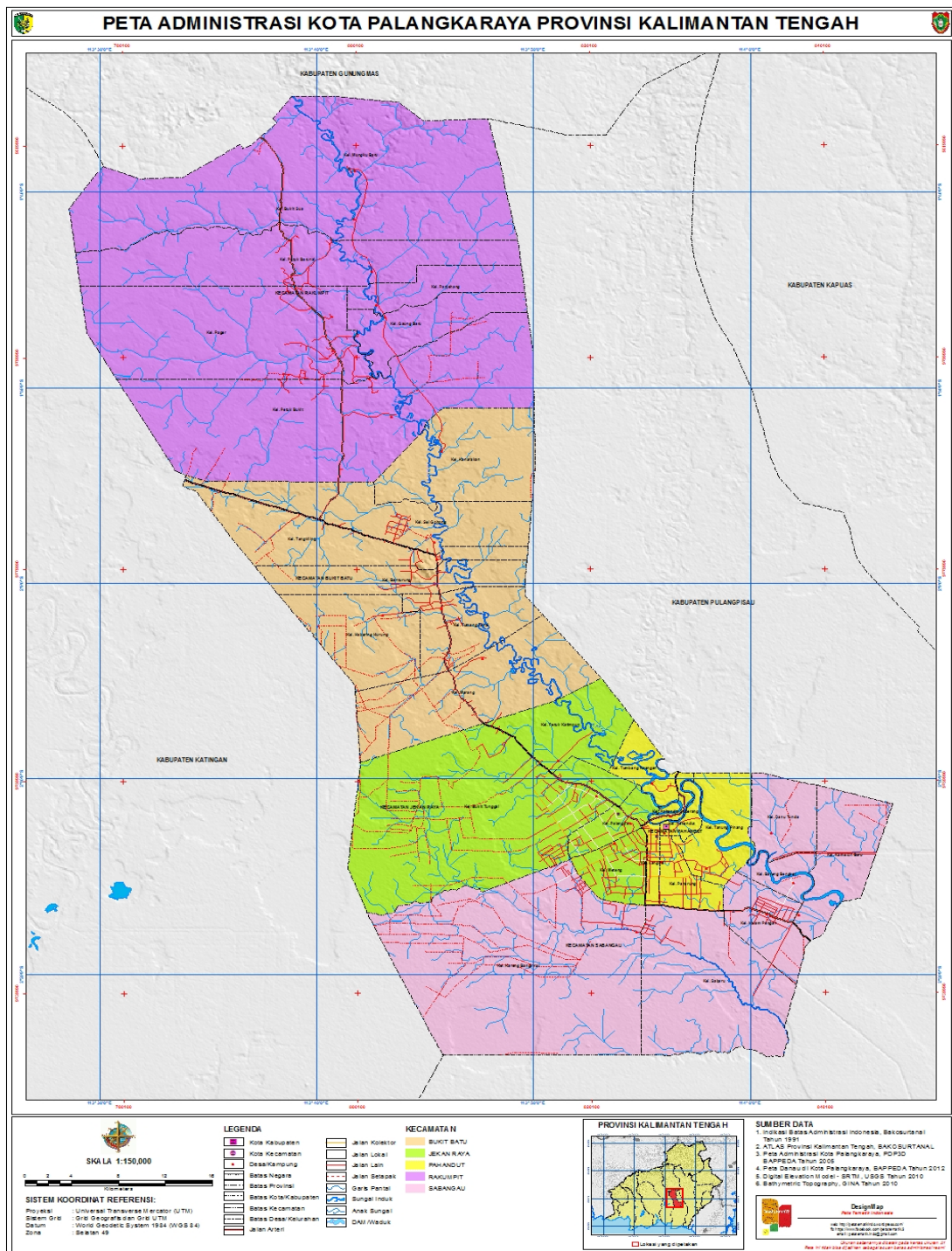
Visi Kota Palangka Raya dalam RPJMD Kota Palangka Raya untuk periode tahun 2018-2023 yaitu “TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. Visi ini adalah menjadi kota yang teridentifikasi dalam 8 (delapan) aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek: pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Yang dimaksud dengan TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan meningkatnya daya beli masyarakat.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur dan teknologi informasi untuk menjadi kota yang cerdas.
3. Meningkatnya kemandirian ekonomi kota menuju kota jasa yang berkelanjutan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA adalah:

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.
5. Terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin melalui upaya pemanfaatan potensi sumberdaya oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dengan membangun kebersamaan dalam semua dimensi kehidupan.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya

Sumber: petatematikindo.files.wordpress.com, 2018

### 2.3 Misi Kota Palangka Raya

Berdasarkan uraian dari makna Visi tersebut dan untuk mewujudkannya dalam 5 (Lima) tahun ke depan disusunlah Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas).  
Meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
2. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas).  
Meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas).  
Meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

### 2.4 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang diuraikan secara umum berdasarkan Visi dan Misi yang ada sebagai berikut:

1. Misi Satu : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi. Ditetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan dan 2 (dua) Sasaran Pembangunan adalah :  
Tujuan 1 : Meningkatkan Pemerataan pembangunan infrastruktur dengan Sasaran Pembangunan yaitu : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap  
Tujuan 2 : Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
2. Misi Kedua: Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan. Dengan 2 (dua) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran Pembangunan:



Tujuan 3 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
- Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)

Tujuan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
- Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik
- Meningkatnya Kerukunan Masyarakat (M2S6)

3. Misi Tiga: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan. Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

Tujuan 5 Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

- Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi
- Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan

## **BAB III**

### **ANALISA KONDISI DAN KEBUTUHAN TIK**

Analisa kondisi dan kebutuhan akan pemanfaatan TIK di lingkup Pemko Palangka Raya dimulai dengan dengan cara mengumpulkan data mengenai kondisi eksisting. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survey dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara dengan kepala atau wakil dari Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Penyebaran kuesioner dilakukan di 32 SOPD dan 5 kantor kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 29 Mei 2019.

Isi kuesioner mencakup kondisi infrastruktur/perangkat keras yang dimiliki, kondisi jaringan internet di masing-masing SOPD, sistem informasi yang dipakai/ pernah dipakai ataupun yang diharapkan dapat diterapkan di SOPD tersebut, kondisi SDM yang memiliki atau tidak memiliki kemampuan komputer, pengolahan dan diseminasi data, serta kebijakan terkait TIK dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Setelah itu, dilakukan validasi terhadap isian kuesioner melalui metode wawancara.

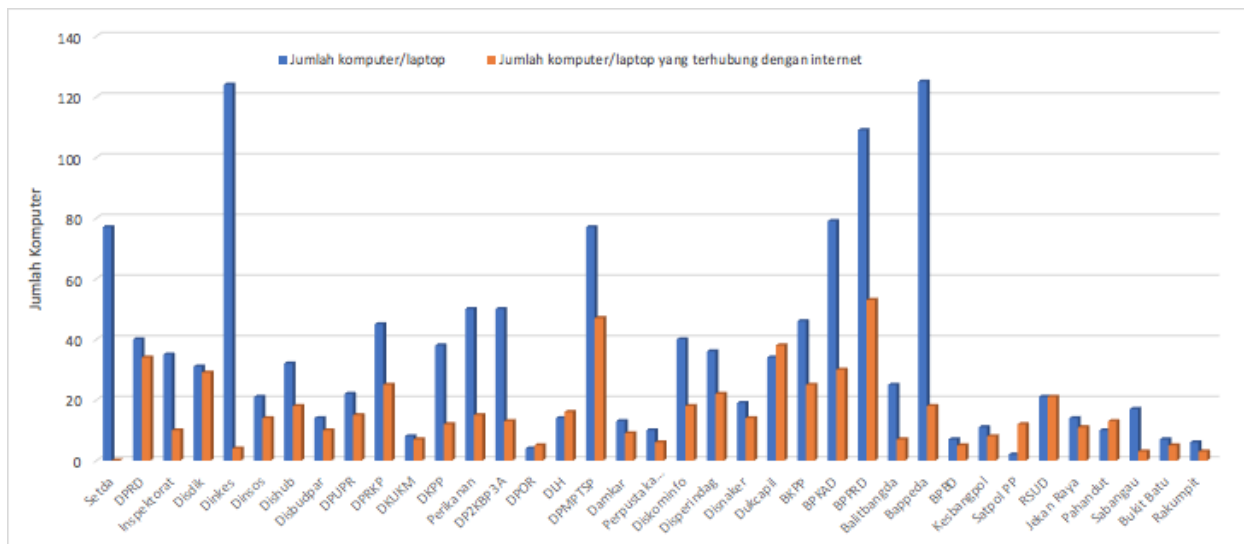
#### **3.1 Kondisi Eksisting**

Dalam pembuatan Master Plan TIK Kota Palangka Raya, analisa kondisi eksisting dilakukan berdasarkan hasil isian kuesioner dari SOPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Analisa atas kondisi eksisting ini dibagi atas analisa kondisi infrastruktur dan perangkat keras, analisa kondisi eksisting penggunaan aplikasi (software), analisa kondisi eksisting sumber daya manusia, analisa kondisi eksisting diseminasi data dan kebijakan IT.

##### **3.1.1 Kondisi Infrastruktur dan Perangkat Keras**

Pemanfaatan media internet pada instansi dalam pengelolaan data yang tidak lepas dari penggunaan komputer/laptop/netbook yang merupakan alat proses pertukaran data antar pengguna. Proses pertukaran data antar instansi yang cepat dan tepat bergantung kepada ketersediaan fasilitas komputer/laptop/netbook dan jaringan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Berdasarkan hasil survei terlihat bahwa keseluruhan SOPD yang ada di jajaran

Pemerintah Kota Palangkaraya rata-rata telah memiliki sarana komputer dan laptop dengan jumlah yang beragam, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.



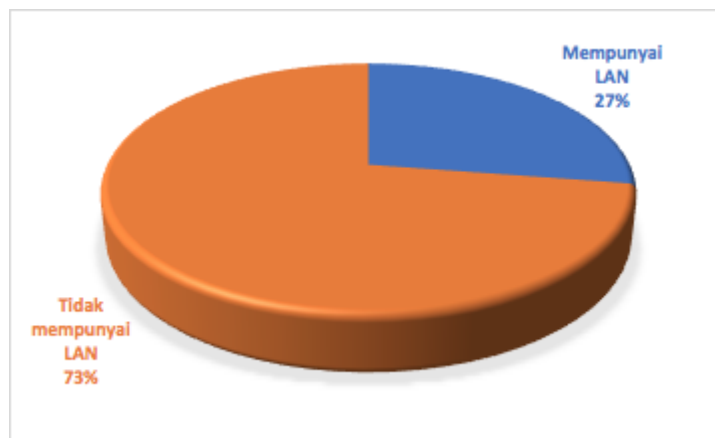
Gambar 3.1 Jumlah komputer/laptop yang terhubung dan tidak terhubung dengan internet di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

Hanya saja, distribusi komputer pada SOPD Pemko Palangka Raya belum merata antara Badan/Dinas yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1, ada SOPD yang memiliki komputer dengan jumlah lebih dari 100 buah tetapi ada SOPD yang memiliki jumlah komputer kurang dari 10 buah. Jumlah komputer yang masih sedikit banyak ditemukan di kantor kecamatan. Padahal seperti yang diketahui, kantor kecamatan merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Rasio jumlah komputer dan laptop dalam kondisi baik milik pemerintah terhadap jumlah pegawai sudah dirasa ideal yaitu 1 komputer/laptop berbanding dengan 2 pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sarana komputer dan laptop yang dimiliki sudah sangat memadai untuk operasional kegiatan pemerintahan. Apalagi jumlah laptop/notebook yang dapat digunakan secara *mobile* lebih banyak daripada jumlah komputer PC. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah spesifikasi komputer/laptop yang dimiliki saat ini masih layak untuk menunjang kegiatan operasional SOPD. Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi

komputer dan aplikasi yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan yang cukup pesat.

Jumlah komputer/laptop yang terhubung dengan internet SOPD di lingkup Pemko Palangka Raya masih dirasa kurang. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa jumlah komputer dan laptop yang dapat terhubung ke internet hanyalah 31% dari total komputer dan laptop yang tersedia di lingkup Pemko Palangka Raya. Walaupun sebenarnya berdasarkan hasil survey, jumlah SOPD yang memiliki jaringan internet sudah cukup tinggi, yaitu 34 SOPD dan hanya 3 SOPD yang belum terhubung dengan internet. Minimnya jaringan LAN merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya jumlah komputer dan laptop yang terhubung dengan internet. Keberadaan jaringan LAN di seluruh SOPD yang ada di Pemerintah Kota Palangkaraya hanya mencapai 27% (lihat Gambar 3.2).



Gambar 3.2 Ketersediaan jaringan LAN di masing-masing SOPD

Pemerintah Kota Palangka Raya sudah memiliki 15 komputer server yang dipergunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Hanya saja, keberadaan komputer server ini masih tersebar di beberapa SOPD. Setiap server dipergunakan untuk kebutuhan aplikasi yang dijalankan oleh masing-masing SOPD, antara lain sebagai server aplikasi SPSE di Sekretariat DPRD, sebagai server email dan website setiap SOPD yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Keberadaan server berikut dengan kegunaan dan spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Lokasi dan spesifikasi server di lingkungan Pemko Palangka Raya

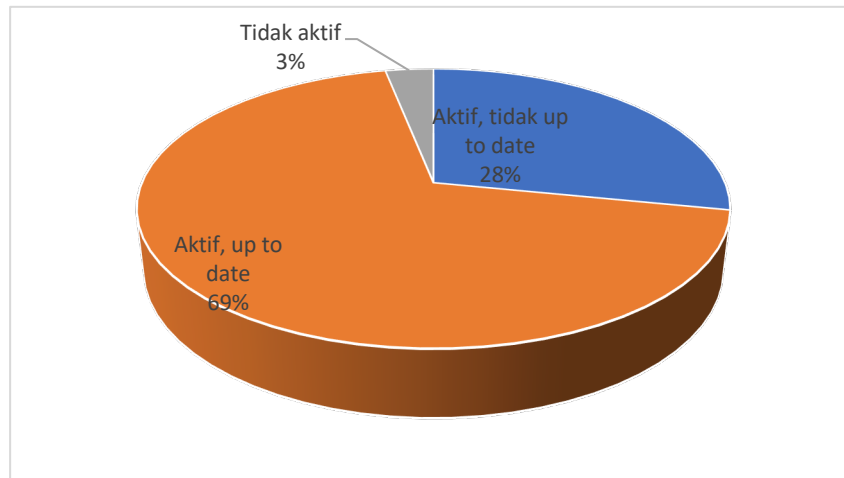
<b>Nama SOPD</b>	<b>Jumlah Server</b>	<b>Kegunaan</b>	<b>Spesifikasi</b>
Sekretariat DPRD	3	- Aplikasi SPSE - Backup SPSE	HP DL 38 IBM Tower
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Aplikasi	IBM HP Proliant
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3	Aplikasi, Email dan Website	IBM Tower Lenovo Server
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Aplikasi SIAK dan KTP Elektronik	Windows Server
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4	- Rack Server - HDD Server - Server BPHTB	- Fortune - IBM - HP Proliant DL 8069

### 3.1.2 Kondisi Eksisting Penggunaan Aplikasi (*Software*)

Keberadaan website dalam satu SOPD merupakan alat bantu yang cukup vital penyampaian informasi kepada masyarakat umum. Terdapat 34 SOPD dan kantor kecamatan yang telah memiliki website resmi dan dipergunakan secara aktif untuk memberikan informasi mengenai kegiatan SOPD dan data-data terkait yang berguna bagi masyarakat (dapat dilihat pada lampiran 1). Hanya 3 (tiga) SOPD yang belum memiliki website, salah satunya adalah kecamatan Rakumpit. Hal ini dikarenakan lokasi kantor kecamatan yang berada cukup jauh dari pusat kota dan di luar jangkauan akses internet.

Dari SOPD-SOPD dan Kantor kecamatan yang memiliki website, sebagian besar (69%) adalah website yang aktif dan up to date. Hanya sebagian kecil di antaranya yaitu 28% memiliki

informasi yang tidak up to date atau tidak pernah mengupdate informasi selama 5 bulan atau lebih. Ada satu website yang tidak aktif yaitu dimiliki oleh kantor kecamatan Sabangau.



Gambar 3.3 Status website resmi SOPD di Pemerintah Kota Palangka Raya

Sistem operasi yang dipergunakan dalam kegiatan operasional SOPD meliputi Microsoft Windows, MacOS dan Linux. Mayoritas komputer dan laptop memiliki sistem operasi Microsoft Windows, kurang dari 1% dari seluruh PC dan laptop yang memiliki sistem operasi MacOS dan Linux. Sistem Operasi Linux hanya digunakan pada komputer server. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Microsoft Windows sebagai sistem operasi adalah lisensi. Karena mayoritas sistem operasi windows yang terinstal tidak dilengkapi dengan lisensi yang benar. Hal ini berpotensi dalam melanggar Undang-Undang HaKI Nomor 19 Tahun 2002.

Aplikasi yang dipergunakan di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dirasa sudah cukup memadai untuk mendukung manajemen pemerintahan (lihat lampiran 2). Walaupun beberapa aplikasi diantaranya adalah merupakan hasil pengembangan di tingkat pusat yang diturunkan ke daerah. Adapula perangkat lunak yang dikembangkan oleh SOPD itu sendiri untuk mengakomasi kebutuhan penyampaian informasi di lingkup SOPD tersebut. Berdasarkan hasil survei, hampir semua perangkat lunak ini baik yang dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah daerah atau yang dikembangkan oleh instansi pusat, saat ini dalam kondisi berfungsi secara optimal.

Berdasarkan hasil survey ditemukan bahwa beberapa beberapa SOPD menyatakan kebutuhan mereka akan aplikasi baru yang dapat menunjang aktivitas dalam memberikan pelayanan publik (dapat dilihat pada Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Kebutuhan aplikasi baru dari tiap SOPD

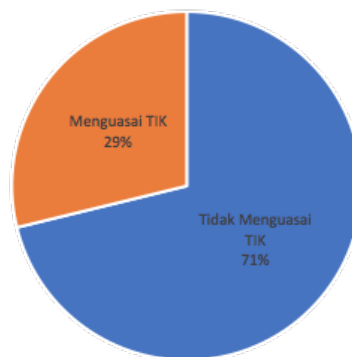
<b>Nama SOPD</b>	<b>Aplikasi yang dibutuhkan</b>
Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	- Sistem Informasi Kepegawaian - Sistem Informasi Keuangan
Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	Sistem Informasi Perjalanan Dinas
Inspektorat Kota Palangka Raya	Sistem Pengarsipan berkas/dokumen
Dinas Sosial Kota Palangka Raya	- Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (Absensi) - Aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	Software PLATO (Kementrian PU)
Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Sistem Informasi Manajemen Perikanan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	- Sistem Informasi publik - Aplikasi /SI penyimpanan database pemantauan, pengujian dan pengelolaan LH - Aplikasi tentang perijinan lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	Electronic document (e-doc)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	Server Induk Command Centre (CC Room)
Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Palangka Raya	JIK (Jaringan Informasi Kearsipan) di lingkungan pemko Palangka Raya
Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	Bursa kerja daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya	E-Kinerja/E-Performance
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya	- Aplikasi data kemiskinan - Sistem Informasi kebinamargaan - E-Planning - KRISNA SELARAS
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota Palangka Raya	- SISMADAK - SIMRS
Kecamatan Pahandut	- Aplikasi kepegawaian internal

Nama SOPD	Aplikasi yang dibutuhkan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi pertanahan</li> <li>- Aplikasi IMB</li> <li>- Aplikasi dispensasi menikah</li> </ul>

### 3.1.3 Kondisi Eksisting Sumber Daya Manusia

Salah satu kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan operasional administrasi pemerintahan dalam penguasaan TIK oleh pegawai di lingkup Pemko Palangka Raya. Berdasarkan hasil survey, kemampuan pegawai PNS dan non PNS dalam penguasaan TIK masih lah sangat rendah. Hanya 29% dari total pegawai yang menguasai komputer sementara 71% lainnya masuk dalam kategori tidak menguasai komputer. Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat visi dan misi kota Palangka Raya adalah membangun kemajuan kota Palangka Raya berbasiskan *Smart Environment*, *Smart Society* dan *Smart Economy*. Untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan TIK yang baik dan siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0

Kondisi Kemampuan TIK Pegawai di Pemko Palangka Raya



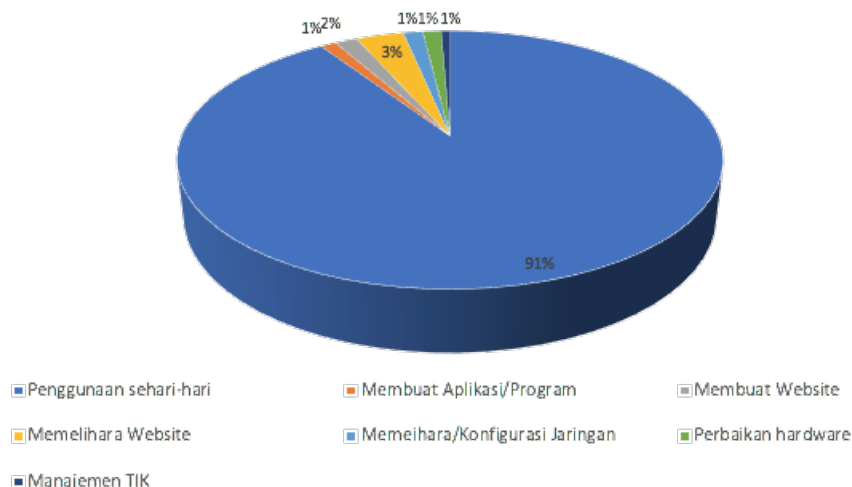
Gambar 3.4 Kondisi kemampuan TIK pegawai di Pemko Palangka Raya

Permasalahan yang terjadi mengenai kondisi SDM bukan hanya di jumlah pegawai yang menguasai TIK saja, namun juga pada tingkatan yang lebih lanjut dalam penggunaan TIK. Mayoritas pegawai yang menguasai TIK hanya mampu menggunakan komputer untuk kebutuhan sehari-hari seperti mengetik surat atau menjadi operator atas aplikasi tertentu. Tidak banyak pegawai yang memiliki kemampuan *coding* atau membangun aplikasi, hanya 1% dari



seluruh total pegawai yang menguasai komputer. Kemampuan pegawai dalam memelihara jaringan dan memperbaiki kerusakan perangkat keras juga dirasa masih sangat kurang.

**Distribusi Kemampuan TIK Pegawai di Pemko Palangka Raya**



**Gambar 3.5 Distribusi kemampuan TIK pegawai Pemko Palangka Raya**

Salah satu yang juga sangat penting dalam pengelolaan data dan informasi pada sistem yang berbasis jaringan adalah adanya personil yang ditugaskan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sistem informasi ataupun sistem jaringan lokal. Belum semua SOPD menugaskan staf khusus untuk menangani pengelolaan TIK. Ada 11 SOPD yang memiliki staf khusus menangani penggunaan TIK. Walaupun jumlahnya belum besar, namun ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya pengelolaan TIK dalam suatu kantor. Adapun tugas yang diberikan adalah pemeliharaan website, operator aplikasi dan memelihara jaringan.

**Tabel 3.3 SOPD yang memiliki staf khusus terkait TIK**

No	Nama SOPD	Uraian tugas staf yang khusus menangani bidang TIK
1	Dinas Pendidikan	Menangani data Dapodik
2	Dinas Perhubungan	Menginput database

3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Operator website dan operator PPID
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memelihara website
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemeliharaan jaringan, website, maintenance software dan hardware
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pengelola SIM Kepegawaian. Rincian tugas: mengupdate data PNS, memverifikasi dan menyajikan data PNS, menyelesaikan konversi NIP, menyusun DUK
7	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Mengelola server, Mengelola aplikasi pajak daerah, maintenance server (operator console)
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai admin dan operator aplikasi
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mengelola website, mengelola email
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Menjalankan aplikasi khusus; mengoperasikan komputer; mengelola website
11	Kecamatan Pahandut	Operator Website

### 3.1.4 Diseminasi data dan kebijakan IT

Seperti yang terlihat pada lampiran 2 terdapat banyak aplikasi yang digunakan bersama oleh SOPD, terutama aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah daerah dan pusat. Hal ini mempengaruhi ketersediaan data dan informasi yang disediakan oleh tiap SOPD ke pihak yang terkait. Keberadaan jaringan internet menyebabkan pengiriman data dari dan ke suatu SOPD menjadi lebih mudah. Melalui keberadaan website Pemko dan SOPD, masyarakat pun bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan pemerintah melalui layanan elektronik yang ada. Banyaknya produk yang dihasilkan oleh SOPD baik yang merupakan produk yang rutin dikeluarkan secara reguler, seperti laporan dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk

cetakan; maupun produk yang bukan rutin menyebabkan perlunya pertukaran data dari satu SOPD ke SOPD lain.

Transaksi pertukaran data dari satu SOPD ke SOPD lainnya terjadi menggunakan bentuk *hard copy* seperti cetakan atau laporan tertulis dan menggunakan transaksi elektronik pada pertukaran data seperti penggunaan e-mail dan lain sebagainya. Hanya saja diseminasi data ini terbatas pada internal SOPD di lingkup Pemkot Palangka Raya dan juga ke instansi terkait di level pusat. Belum semua data yang tersedia dapat diakses secara publik oleh stakeholder seperti masyarakat umum dan bidang usaha.

Ditinjau dari arah dan strategi pengembangan e-Government, Pemerintah Kota Palangka Raya pernah mengeluarkan sebuah dokumen perencanaan strategis yang di dalamnya telah menjabarkan hubungan antara visi, misi, strategi dan program dengan sistem e-Government termasuk mengatur tahapan dan substansi pengembangan e-Government yang dapat menjadi acuan bagi setiap SOPD. Hanya saja dokumen ini berlaku sampai dengan tahun 2014. Mengingat perkembangan teknologi yang begitu cepat, memang diperlukan adanya pembaharuan atas perencanaan strategis terkait TIK untuk 5-10 tahun ke depan. Selain itu, kebijakan/regulasi yang terkait TIK pernah diterbitkan dan diterapkan oleh SOPD-SOPD di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya, baik dalam bentuk Peraturan Menteri, SK Walikota, dan/atau SK Kepala SOPD. Tercatat 13 instansi/dinas yang telah memiliki kebijakan/regulasi terkait TI (lihat lampiran 3).

### **3.2 Kondisi Yang Ingin Dicapai**

Dalam sub bagian ini dipaparkan kondisi ideal yang dapat diterapkan di Kota Palangka Raya untuk mencapai pemanfaatan TIK yang maksimal. Paparan kondisi ideal ini dibagi atas beberapa bagian yaitu kondisi ideal kelembagaan, hukum dan kebijakan terkait TIK, perangkat lunak, infrastruktur dan sumber daya manusia.

### 3.2.1 Kelembagaan

Berdasarkan dokumen evaluasi PeGI (2013), dimensi kelembagaan mencakup keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan konsep antara lain: keberadaan organisasi struktural yang lengkap, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas, kelengkapan unit dan aparatur, dan legalitas (dasar hukum). Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) No. 3 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan strategis *e-government*, perlu dibentuk organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan e-government di daerah. PerMen No.41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional kembali menegaskan bahwa di semua level pemerintahan dan institusi pemerintahan harus menetapkan *Chief Information Officer (CIO)* untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK.

Unit kerja yang mempunyai peran sebagai *Chief Information Officer (CIO)* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membangun tata kelola TIK yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota. Tata kelola TIK ini berisikan perencanaan TIK, pengadaan TIK, pengoperasian TIK dan pengawasan TIK
- Menyediakan, mengelola dan merawat sumber daya TIK yang terdiri dari infrastruktur informasi, jaringan dan teknologi, aplikasi, dan SDM.
- Mengelola portal informasi Pemerintah Kota dan sistem informasi yang terintegrasi antar SOPD.
- Berperan sebagai *Help Desk* untuk penyelenggaraan TIK Pemko.
- Melakukan koordinasi TIK dan bekerja sama dengan satuan kerja TIK antar SOPD.

CIO dapat dipimpin langsung oleh Kepala Daerah dengan pelaksana harian dipimpin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan eselon tertinggi (Sekda). Anggota CIO adalah SOPD di lingkungan Pemerintah Kota yang berfungsi sebagai penyedia dan pengelola baik dari jaringan, aplikasi dan perawatannya. Hal tersebut ditunjang dengan adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi pada SOPD tersebut sesuai dengan bidang kegiatan TIK. SOPD yang

ditugaskan juga perlu mendapat kekuasaan dan anggaran yang memadai untuk bisa mempunyai kemampuan dalam melakukan tupoksinya di dalam penyelenggaraan kebijakan TIK.

Pentingnya data dan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan membuat Pemerintah Kota Palangka Raya membutuhkan strategi TI yang terencana dengan baik. Perencanaan TI melibatkan kerjasama seluruh SOPD yang tidak hanya bertugas melayani masyarakat namun juga yang bertanggung jawab melayani satuan kerja lainnya. Strategi TIK merupakan bentuk pengkoordinasian di bidang perencanaan. Sekda dan BAPPEDA dapat membentuk tim yang bisa disebut Dewan TIK Daerah (DETIKDA) yang terdiri dari sejumlah kepala SOPD yang paling banyak berkepentingan dengan informasi, baik yang menggunakan ataupun yang menyediakan. Keberadaan Dewan TIK Daerah didukung juga dengan melibatkan pihak professional, baik dari kalangan akademis maupun bisnis.

### **3.2.2 Hukum dan Kebijakan**

Kebijakan adalah rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas (Jawade Hafidz, 2013). Dalam konteks pemanfaatan TIK dan penerapan e-government, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang menjadi pedoman dan dasar bagi tata kelola TIK. Kebijakan yang berupa dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum nantinya menjadi panduan yang bertujuan untuk menentukan arah pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kota selama beberapa tahun kedepan.

Dalam konteks penerapan TIK, dibutuhkan kebijakan atau undang-undang yang berkekuatan hukum untuk memperkecil dampak negatif serta menjamin hak-hak individu baik hak untuk kesetaraan akses informasi ataupun hak perlindungan *privacy*. Hukum dan perundangan-undangan meliputi:

- Kebebasan mengemukakan pendapat
- Kebebasan penyampaian informasi
- Hak untuk mendapat perlindungan *privacy*

- Hak untuk mendapatkan akses pada data-data pemerintah
- Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual

Perlindungan terhadap semua hak-hak diatas terkadang tidaklah saling mendukung satu sama lain, adakalanya perlindungan terhadap *privacy* akan bertentangan dengan hak akses terhadap informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan hukum dan perundangan-undangan yang disepakati bersama untuk dapat menjamin sebaik mungkin pengelolaan informasi di pemerintahan. Pemerintah dapat mempersiapkan beberapa jenis perundangan-undangan dan kebijakan yang berkekuatan hukum berkaitan dengan permasalahan diatas, antara lain:

- Undang-undang yang mengatur tanggung jawab masing-masing unit dalam penyediaan data dan dalam pengelolaan data
- Undang-undang atau kebijakan mengenai *E-Transaction, Electronic Signature*
- Undang-undang mengenai perlindungan kekayaan intelektual (*patent* dan *copyright*)
- Undang-undang mengenai perlindungan *privacy*
- Undang-undang untuk mengatasi *computer pornography*
- Dll.

### **3.2.3 Perangkat Lunak**

Paparan kondisi ideal perangkat lunak terbagi atas kondisi idesal aplikasi dan sistem informasi yang dibutuhkan, prinsip pembangunan perangkat lunak, pengembang perangkat lunak, teknologi yang dipergunakan untuk pembangunan perangkat lunak dan kepemilikan atas perangkat lunak di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

#### *3.2.3.1 Rencana Pengembangan Perangkat Lunak*

Berbagai jenis aplikasi dan sistem informasi dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi ideal pemanfaatan TIK di pemerintahan kota/daerah. Depkominfo, dalam dokumen “Cetak Biru (*Blueprint*) Sistem Aplikasi e-Government Bagi Pemerintah Daerah”, telah menyediakan suatu *framework* bagi perencanaan aplikasi e-Government. Aplikasi-aplikasi tersebut dikelompokkan dalam blok-blok fungsi dan modul yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Tabel

3.4). Arahan ini bersifat generik, artinya dapat disesuaikan dengan fungsi-fungsi dan proses bisnis spesifik yang ada pada suatu organisasi pemerintah daerah. Detail dan spesifikasi masing-masing modul (termasuk deskripsi, fungsi, dan lainnya) dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.4 Taksonomi Blok Fungsi dan Modul Aplikasi e-Government (Depkominfo, 2004)

No.	Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Nama Lain
1.	Pelayanan	-	1. Kependudukan 2. Perpajakan dan Retribusi 3. Pendaftaran dan Perijinan 4. Bisnis dan Investasi 5. Pengaduan Masyarakat 6. Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan	1. SIAK/SIMDUKCAPIL 2. SIM Pajak dan Retribusi, SIM Perpajakan, SIMTAP, SAMSAT 3. SIM Perijinan, SIM Pelayanan Masyarakat, SIM Pendaftaran 4. SIM Bisnis dan Investasi 5. SIM Pengaduan Masyarakat 6. e-Gov Portal
2.	Administrasi dan management	-	1. Surat Elektronik 2. Sistem Dokumen Elektronik 3. Sistem Pendukung Keputusan 4. Kolaborasi dan Koordinasi 5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan	1. Email, SIM Surat 2. Document Management, SIM Arsip 3. Decision Support Systems (DSS) 4. - 5. -

No.	Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Nama Lain
3.	Legislasi	-	1. Sistem Administrasi DPRD 2. Sistem Pemilu Daerah 3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan	1. – 2. SIM Pemilu 3. SIM Perpu
4.	Pembangunan	-	1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan	1. Knowledge Management, Document Management, Data Warehouse 2. SimBangDa 3. SimProyek, e-Procurement 4. SimProyek 5. SimBangDa
5.	Keuangan	-	1. Sistem Anggaran 2. Sistem Kas dan Perbendaharaan 3. Sistem Akuntansi Daerah	1. MAKUDA, SIMKEU, SIM Anggaran 2. MAKUDA, SIMKEU, SIM Perbendaharaan 3. MAKUDA, SIMKEU, SIM Akuntansi Daerah



No.	Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Nama Lain
6.	Kepegawaian	-	1. Pengadaan PNS 2. Sistem Absensi dan Penggajian 3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 4. Sistem Pendidikan dan Latihan	1. SIMPEG 2. Payroll, SIMPEG 3. SIMPEG 4. SIMDIKLAT
7.	Dinas dan Lembaga	Kepemerintahan	1. Pengelolaan Barang Daerah 2. Katalog Barang Daerah 3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. Pengelolaan Perusahaan Daerah	1. SIMBADA 2. – 3. MAPATDA, SIMPENDA 4. SIM Perusahaan Daerah
		Kewilayahan	1. Tata ruang dan Lingkungan Hidup 2. Potensi Daerah 3. Kehutanan 4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 5. Perikanan dan Kelautan 6. Pertambangan dan Energi 7. Pariwisata 8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1. SIM Tata Ruang 2. SIMPOTENDA, SIMPROMODA, GIS-SIMPOTENDA 3. SIM Kehutanan 4. SIM Pertanian, SIM Perkebunan 5. SIM Perikanan dan Kelautan, SIM Perikanan, SIM Kelautan 6. SIM Tamben, SIM Pertambangan 7. SIMPAR, SIM Pariwisata 8. SIM IKM, SIM UKM

No.	Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Nama Lain
		Kemasyarakatan	1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Ketenagakerjaan 4. Industri dan Perdagangan 5. Jaring Pengaman Sosial	1. SIMKES 2. SIMDIKDA 3. SIMNAKER 4. SIMINDAG 5. SIM JPS
		Sarana dan prasarana	1. Transportasi 2. Jalan dan Jembatan 3. Terminal dan Pelabuhan 4. Sarana Umum	1. SIM Transportasi 2. – 3. – 4. -

Dari segi tujuan dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan (masyarakat umum, sektor bisnis, instansi lain, dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota), aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Aplikasi *Government to Citizens* (G2C)

Aplikasi G2C berupaya membangun kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan dan pelayanan sehari-hari. Salah satu tujuan dibangunnya aplikasi G2C adalah mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis elektronik yang akan meningkatkan kualitas hubungan dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Beberapa aplikasi yang termasuk jenis ini antara lain adalah, aplikasi untuk pengurusan KTP dan catatan sipil lainnya, atau aplikasi-aplikasi untuk pengurusan perijinan-perijinan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

- Aplikasi *Government to Business* (G2B)

Aplikasi G2B bertujuan untuk membuka akses informasi dan pelayanan kepada dunia usaha sehingga interaksi antara bisnis dan pemerintah berlangsung lebih lancar dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya. Beberapa aplikasi yang termasuk jenis ini antara lain adalah informasi potensi daerah, dan lain-lain aplikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

- Aplikasi *Government to Government* (G2G)

Relasi G2G bertujuan untuk membangun hubungan antar lembaga pemerintah berbasis TIK untuk mendukung terjalannya komunikasi dan koordinasi. Aplikasi G2C diharapkan dapat memperlancar proses administrasi serta proses pertukaran data antar instansi pemerintah baik di daerah atau di pusat. Bentuk penerapan G2G antara lain basis data terpadu yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah secara bersama-sama.

- Aplikasi *Government to Employee* (G2E)

Aplikasi G2E berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap pegawai pemerintahan secara elektronis. Keberadaan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang bekerja di berbagai instansi. Beberapa aplikasi yang termasuk jenis ini antara lain aplikasi kepegawaian, aplikasi keuangan, sistem peningkatan kompetensi, ataupun sistem pengelolaan gaji dan keuangan, aplikasi untuk mendukung interaksi antar pegawai (*groupware*), dan lain-lain aplikasi sejenis.

Adapun pembangunan aplikasi dan sistem informasi sudah termasuk strategi yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut :

- Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi :
  - Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
  - Penyiapan SDM;
  - Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll;

- Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi :
  - Pembuatan situs informasi publik interaktif;
  - Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi :
  - Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
  - Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi :
  - Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

#### 3.2.3.2 Prinsip Pembangunan Perangkat Lunak

Setiap pembangunan perangkat lunak di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya harus dibangun dengan memperhatikan prinsip-prinsip reliabilitas, interoperabilitas, skalabilitas.

- *Reliable* artinya bahwa perangkat lunak bersifat handal, mampu meminimalisasi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh operator manusia, dan tidak terpengaruh terhadap perubahan teknologi dimana aplikasi tersebut berjalan (misalnya perubahan sistem operasi yang digunakan, dan lain-lain).
- *Interoperable* artinya bahwa perangkat lunak dapat bersinergi dan bertukar data dengan aplikasi-aplikasi lain yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- *Scalability* artinya bahwa program bersifat modular dan memiliki ruang untuk setiap pengembangan dan penambahan fitur di masa mendatang.

Jika suatu aplikasi tidak dapat dibangun sekaligus, maka pembangunan perangkat lunak dapat dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pembangunan modul interface dasar bagi penginputan data primer, kemudian dilanjutkan dengan modul pengolahan data dan laporan serta pembuatan interface penggunaan data bagi aplikasi lain.

#### 3.2.3.3 Pengembang Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang menunjang proses suatu bisnis yang generik dapat dibangun satu kali secara terpusat dan kemudian digunakan bersama. Yang dimaksud dengan proses bisnis generik

adalah suatu proses bisnis yang umumnya dilakukan di seluruh SOPD; misalnya proses bisnis pengarsipan surat, absensi, pengelolaan data kepegawaian, dan lain-lain. Pengembangan perangkat lunak yang bersifat umum ini dapat dilakukan oleh SOPD yang khusus menangani TIK (Diskominfo), atau jika ada, oleh SOPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan proses bisnis terkait; misalnya pembangunan sistem informasi pegawai dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pengembangan perangkat lunak yang mengelola data yang spesifik dan sektoral dapat dilakukan oleh SOPD terkait dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dengan aplikasi lain. Contoh dari perangkat lunak yang bersifat sektoral ini misalnya aplikasi yang mengelola data kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

#### *3.2.3.4 Teknologi Pengembangan Perangkat Lunak*

Dalam upaya memenuhi prinsip-prinsip reliabilitas, interoperabilitas, skalabilitas; pengembangan perangkat lunak di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut.

- Sedapat mungkin aplikasi dibangun menggunakan teknologi yang berbasis *open source*
- Aplikasi dibangun berbasis web
- Memiliki antarmuka pertukaran data (*webservice*) dengan aplikasi lain

#### *3.2.3.5 Kepemilikan Sistem Operasi dan Aplikasi Dasar Penunjang*

Sebagai lembaga pemerintahan, tentu saja Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat memenuhi aspek legalitas perangkat lunak dengan menggunakan sistem operasi dan aplikasi penunjang yang original pada semua komputer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Aplikasi penunjang yang dimaksud antara lain aplikasi pengolah kata, angka dan gambar. Sistem Operasi dan aplikasi tersebut dapat diselenggarakan secara terpusat melalui SOPD pengelola TIK (Diskominfo) dengan menggunakan lisensi korporat dan dapat dipergunakan di seluruh SOPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

### 3.2.4 Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras

Berikut ini adalah kondisi infrastruktur jaringan dan perangkat keras yang diinginkan untuk dicapai di masa mendatang.

- Seluruh SOPD memiliki perangkat keras (komputer dan piranti penunjangnya) dengan jumlah dan kualitas perangkat yang cukup untuk mensupport proses bisnis SOPD.
- Semua sistem operasi dan aplikasi dasar telah menggunakan perangkat lunak original
- Seluruh SOPD terhubung dengan jaringan internet yang disediakan secara terpusat oleh SOPD pengelola TIK (Diskominfo)
- Seluruh SOPD telah menggunakan domain resmi \*.palangkaraya.go.id
- Seluruh pegawai memiliki alamat email official milik Pemerintah Kota Palangka Raya
- Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki *email server*, *web server*, *application server*, dan *storage server* yang terpusat dalam sebuah data center. Web dan application server tersebut berfungsi untuk menampung seluruh aplikasi dan web yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya; sedangkan *storage server* dipergunakan untuk menyimpan seluruh dokumen dan arsip elektronik.
- Setiap SOPD memiliki LAN
- SOPD yang dalam satu cluster saling terhubung dalam sebuah WAN

#### 3.2.4.1 Data Center

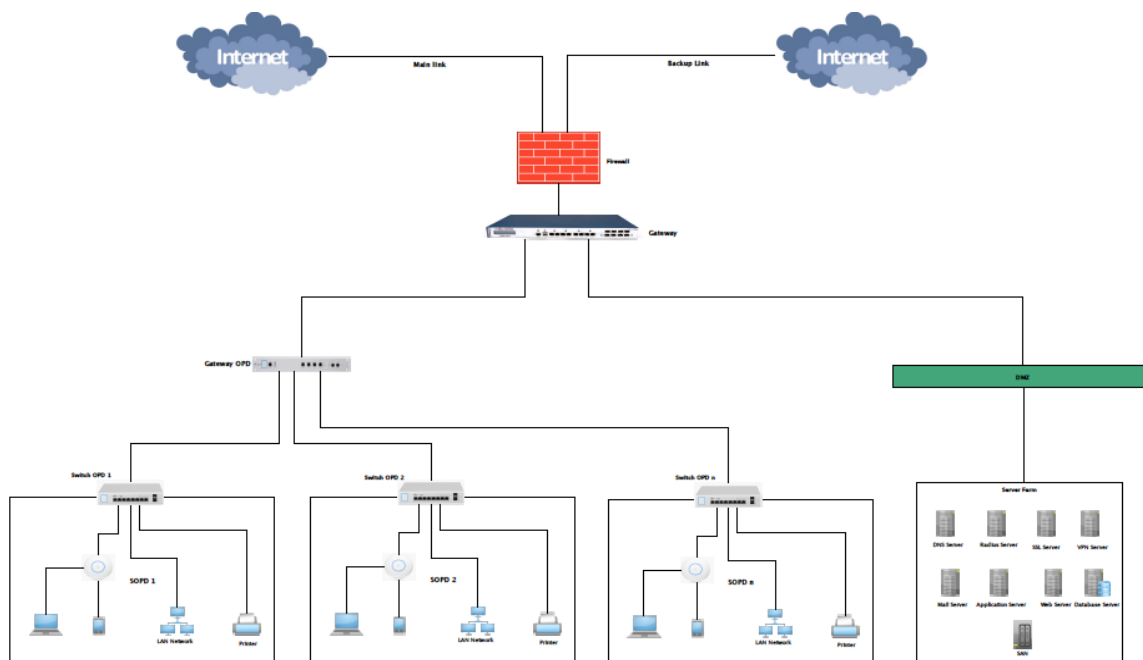
Data center yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan memiliki karakteristik sekurang-kurangnya sebagai berikut.

1. Data center hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan prinsip *modularity*, *flexibility*, dan *scalability* untuk pengembangan infrastruktur di masa mendatang.
2. Berlokasi di tempat yang memiliki potensi bencana (banjir, kebakaran, kebocoran air, dsb.) yang rendah.
3. Memiliki sistem keamanan gedung yang baik selama 24 jam. Harus terdapat SOP hak akses yang jelas, dan bangunan dilengkapi dengan sistem video keamanan.
4. Memiliki peralatan pemadam kebakaran, sistem anti petir yang baik dan surge protection pada masing-masing peralatan

5. Untuk data center yang berada di lantai atas, hendaknya memperhitungkan pula *loading capacity* lantai (kekuatan untuk menanggung beban) per meter persegi.
6. Lantai ruangan memiliki struktur *raised floor*.
7. Semua perlengkapan dan kabel disusun dengan rapi serta memiliki dokumentasi/*labelling* yang jelas.
8. Dilengkapi dengan fasilitas untuk mempertahankan temperatur dan kelembaban yang ideal.
9. Memiliki fasilitas back up listrik, seperti UPS dan generator.
10. Memiliki performa uptime minimal Tier 2.
11. Detail perancangan dapat mengacu pada dokumen *technical note* Tier Standard yang dikeluarkan oleh Uptime Institute.

#### 3.2.4.2 Jaringan Komputer

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, diharapkan bahwa di masa mendatang seluruh SOPD memiliki jaringan internet yang dikelola terpusat oleh Diskominfo, seluruh SOPD memiliki internal LAN, dan cluster LAN tersebut terhubung menjadi sebuah WAN. Gambaran kondisi tersebut dapat digambarkan dalam topologi konseptual yang diperlihatkan pada Gambar.



### Gambar 3.6 Topologi Jaringan Pemerintah Kota Palangka Raya

Dalam penerapannya, koneksi WAN (antar LAN) dapat diimplementasikan dengan menggunakan fiber optik ataupun *wireless* dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Lokasi kantor SOPD di Pemerintah Kota Palangka Raya yang sebagian besar berada dalam satu kompleks.
- Kontur tanah di Palangka Raya yang bersifat tanah datar dan belum banyak bangunan tinggi.
- Tingkat kekerapan sambaran petir yang tinggi di wilayah Palangka Raya.

Terkait kondisi di atas, maka koneksi berbasis kabel optik dapat menjadi pilihan sebagai koneksi antara SOPD yang berperan sebagai gateway network (Diskominfo) dengan SOPD pengguna yang berada di dalam satu kompleks; sementara untuk koneksi internal SOPD (LAN) dapat menggunakan infrastruktur berbasis *wireless*. Sebagai konsekuensi penggunaan teknologi *wireless*, diperlukan perencanaan proteksi petir dan *grounding* yang betul-betul baik untuk melindungi perangkat dari resiko kerusakan akibat *surge* (lonjakan) listrik.

#### **3.2.5 Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan TIK dalam organisasi pemerintahan. SDM dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu SDM Internal dan SDM Eksternal (Priyono, 2010). SDM internal adalah pegawai pemerintahan, sedangkan eksternal adalah masyarakat daerah pada umumnya.

Kondisi ideal sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pemerintah kota Palangka Raya adalah agar setiap pegawai pemerintah baik ASN ataupun tenaga kontrak dapat memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Berikut adalah karakteristik karakteristik penguasaan keterampilan TIK yang dibutuhkan oleh ASN atau tenaga kontrak berdasarkan perannya dalam organisasi pemerintahan. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan satu orang pegawai menguasai beberapa jenis keterampilan TIK dan menjalankan lebih dari satu peran.



Tabel 3.5 Kebutuhan Pegawai Pemkot Palangka Raya Secara Umum

No	Peran	Karakteristik keterampilan	Penempatan
1	Operator komputer dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan komputer dan perangkat keras terkait; termasuk printer, scanner, dan lain-lain</li> <li>• Menggunakan fitur dasar pada program pengolah kata dan angka (misalnya Ms.Word dan Excel)</li> </ul>	SOPD
2	Operator komputer ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan komputer dan perangkat keras terkait; termasuk printer, scanner, dan lain-lain</li> <li>• Menggunakan fitur lanjutan pada program pengolah kata dan angka (misalnya Ms.Word dan Excel)</li> <li>• Menggunakan aplikasi khusus/sistem informasi yang ada dilingkungan Pemko Palangka Raya</li> </ul>	SOPD

Tabel 3.6 Kebutuhan pengelola perangkat keras dan jaringan

No.	Peran	Karakteristik keterampilan	Penempatan
1.	Pengelola perangkat keras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginstal sistem operasi, dan aplikasi-aplikasi dasar.</li> <li>• Melakukan troubleshooting ringan pada perangkat keras yang dimiliki.</li> </ul>	SOPD, Diskominfo
2.	Pengelola jaringan lokal SOPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginstal dan merawat jaringan lokal (LAN) SOPD</li> <li>• Melakukan troubleshooting jaringan jika terdapat kendala pada LAN SOPD</li> <li>• Mengelola keamanan jaringan di lingkungan SOPD</li> <li>• Mengelola distribusi internet dalam ruang lingkup SOPD; termasuk di dalamnya pengelolaan bandwidth dan lain-lain</li> <li>• Sebagai representasi SOPD yang bekerja sama dengan administrator jaringan Pemko Palangka Raya</li> </ul>	SOPD, Diskominfo

No.	Peran	Karakteristik keterampilan	Penempatan
3.	Pengelola jaringan Pemko Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menginstal dan merawat jaringan milik Pemkot Palangka Raya secara umum</li> <li>● Melakukan troubleshooting jaringan jika terdapat kendala jaringan antar SOPD</li> <li>● Mengelola distribusi internet ke SOPD; termasuk di dalamnya pengelolaan bandwidth dan lain-lain</li> <li>● Mengelola keamanan jaringan di lingkungan Pemkot Palangka Raya</li> <li>● Sebagai representasi Pemkot Palangka Raya yang langsung bekerja sama dengan pihak ketiga jika diperlukan dalam penyelenggaraan service jaringan di lingkungan Pemko Palangka Raya</li> </ul>	Diskominfo
4.	Pengelola data center	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menginstal, memelihara dan memonitor perangkat keras dan jaringan pada data center</li> <li>● Memastikan bahwa performa data center berjalan sesuai dengan standar minimum Tier 2</li> <li>● Sebagai representasi Pemko Palangka Raya yang langsung bekerja sama dengan pihak ketiga jika diperlukan dalam penyelenggaraan service data center di Pemko Palangka Raya.</li> </ul>	Diskominfo (data center)

Tabel 3.7 Kebutuhan Pembangun dan Pengelola perangkat lunak

No	Peran	Karakteristik tugas	Penempatan
1	Pengelola web SOPD	Membangun dan mengelola web SOPD	SOPD
2	Operator sistem informasi	Mempergunakan aplikasi dan sistem informasi yang ada di SOPD	SOPD

No	Peran	Karakteristik tugas	Penempatan
3	Pengelola dan Pengembang Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai database administrator</li> <li>Mengembangkan aplikasi di lingkungan SOPD atau Pemko Palangka Raya</li> <li>Membuat dokumentasi aplikasi yang ada di lingkungan SOPD atau Pemko Palangka Raya</li> <li>Membuat dokumen user requirement</li> <li>Sebagai representasi Pemko Palangka Raya yang langsung bekerja sama dengan pihak ketiga jika aplikasi dibuat oleh pihak ketiga.</li> </ul>	SOPD

Tabel 3.8 Kebutuhan Pegawai di Level manajerial pengelola TIK

No.	Peran	Karakteristik tugas	Penempatan
1	Chief Information Officer (CIO)	Memastikan agar investasi dan pengembangan TIK selalu selaras dengan tujuan dan visi misi Pemerintah Kota Palangka Raya	SOPD, Diskominfo
2.	Chief Technology Officer (CTO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang diperlukan di Pemerintah Kota Palangka Raya</li> <li>Memberikan usulan regulasi dan tata kelola yang berhubungan dengan penerapan TIK di lingkungan Pemko Palangka Raya</li> </ul>	Diskominfo

No.	Peran	Karakteristik tugas	Penempatan
3.	Chief Security Officer (CSO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan digital di lingkungan Pemko Palangka Raya</li> <li>Memberikan usulan regulasi dan tata kelola yang berhubungan dengan keamanan digital di lingkungan Pemko Palangka Raya</li> </ul>	Diskominfo

Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang TIK harus dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara internal ataupun secara eksternal. Pemerintah kota Palangka Raya dapat mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan yang mampu menyediakan jasa pelatihan di bidang teknologi informasi yang dibutuhkan. Pemerintah kota dapat pula bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang memiliki jurusan Teknik Informatika dalam menyediakan narasumber/pemateri/mentor untuk memberikan jasa pelatihan dan pendidikan. Selain melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan kemampuan SDM ini juga dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal sehingga tersedia personil-personil dengan kualifikasi dari D3 sampai dengan S3 dibidang teknologi informasi.

Peningkatan kemampuan SDM internal pemerintahan ini juga harus diikuti dengan peningkatan kemampuan SDM eksternal yaitu masyarakat daerah umumnya. Ketertinggalan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi akan berdampak langsung terhadap suksesnya penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang signifikan melalui sosialisasi-sosialisasi secara berkelanjutan, khususnya melalui institusi-institusi pendidikan yang tersedia.

### 3.3 Analisa Gap (Identifikasi Kebutuhan)

Dalam pengembangannya dilakukan penganalisaan terhadap kesenjangan yang ada antara kondisi ideal yang ingin dicapai, kondisi dimana teknologi informasi akan dapat dipergunakan secara optimal dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan kondisi yang ada saat ini. Dari hasil analisa gap ini akan dapat diketahui posisi saat ini dan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan, dan mengacu kepada hal ini akan dikembangkan pula langkah-langkah kedepan,

#### 3.3.1 Kondisi Kelembagaan dan Kebijakan

Analisa gap yang dilakukan pada kondisi kelembagaan dan kebijakan meliputi aspek lembaga-lembaga yang seharusnya terbentuk dan regulasi/kebijakan yang dapat diterapkan bersama oleh SOPD-SOPD. Hasil analisa gap dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Analisa gap kelembagaan dan kebijakan

No	Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang dibutuhkan
1	Lembaga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum terbentuknya unit kerja yang mempunyai peran sebagai <i>Chief Information Officer</i> (CIO)</li><li>• Belum terbentuk Dewan TIK Daerah (DETIKDA) di Kota Palangka Raya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Daerah bersama dengan Kepala SOPD terkait membentuk CIO agar pemanfaatan TIK dapat selaras dengan visi dan Misi Kota Palangka Raya</li><li>• Melakukan pembentukan Dewan TIK Daerah (DETIKDA) yang juga melibatkan pihak profesional, baik dari kalangan akademis maupun bisnis.</li></ul>

No	Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang dibutuhkan
2	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya peraturan walikota yang terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan perlindungan privacy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkannya peraturan walikota yang menyangkut hak-hak individu baik hak untuk kesetaraan akses informasi ataupun hak perlindungan <i>privacy</i>. Hukum dan perundangan-undangan meliputi: Kebebasan mengemukakan pendapat dan menyampaikan informasi, hak untuk mendapat perlindungan privacy danmendapatkan akses pada data-data pemerintah</li> </ul>

### 3.3.2 Kondisi Sistem Informasi dan Aplikasi

Analisa gap yang dilakukan pada kondisi sistem informasi dan aplikasi meliputi aspek fitur, integrasi antar aplikasi yang digunakan bersama oleh SOPD-SOPD, dan regulasi/kebijakan yang telah diterapkan. Hasil analisa gap dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Analisa gap sistem informasi dan aplikasi

No	Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang dibutuhkan
1	Fitur	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sebagian besar aplikasi sistem informasi yang dipergunakan merupakan turunan dari aplikasi di tingkat pusat</li> <li>● Sebagian besar aplikasi sudah berbasis website</li> <li>● Secara umum, aplikasi yang dipergunakan untuk menunjang manajemen perkantoran sudah berjalan dengan baik, dan sebagian besar sudah sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan improvement aplikasi yang sudah berjalan dan menyesuaikan aplikasi tersebut dengan kebutuhan SOPD (Tabel 3.11)</li> <li>● Melakukan improvement aplikasi yang <i>stand-alone</i> dan digunakan oleh unit tunggal menjadi aplikasi yang berbasis online baik berbasis website maupun <i>mobile</i></li> <li>● Melakukan peninjauan ulang terhadap aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul>
2	Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Masih terdapat sistem informasi yang dijalankan secara terpisah</li> <li>● Belum adanya mekanisme ataupun regulasi dalam melakukan integrasi yang bisa membuat keterpaduan data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sistem informasi yang terintegrasi baik secara sistem, data, maupun proses.</li> <li>● Memiliki pemetaan yang jelas mengenai data primer dan kewenangan pengelolaan data primer oleh masing-masing unit kerja.</li> </ul>

No	Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang dibutuhkan
3	Regulasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdapat standarisasi proses pengembangan, implementasi dan pemeliharaan serta dokumentasi aplikasi atau sistem informasi yang mengikat untuk seluruh SOPD</li> <li>• Belum ada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah yang mengatur secara lebih rinci mengenai standarisasi platform yang digunakan oleh aplikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya standarisasi proses pengembangan, implementasi dan pemeliharaan serta dokumentasi aplikasi yang berlaku untuk seluruh unit kerja dan harus dipatuhi oleh pengembang aplikasi.</li> <li>• Adanya kebijakan yang menetapkan standar platform yang digunakan oleh aplikasi sehingga memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut.</li> <li>• Standarisasi metadata dan interoperabilitas data</li> <li>• Kebijakan keamanan informasi</li> </ul>

### 3.3.3 Kondisi Perangkat Keras dan Infrastruktur

Analisa gap yang dilakukan pada kondisi perangkat keras dan infrastruktur meliputi aspek koneksi internet dan LAN, kondisi perangkat komputer di tiap SOPD, keberadaan data centre dan regulasi/kebijakan yang telah diterapkan. Hasil analisa gap dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Analisa gap perangkat keras dan infrastruktur

No	Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang dibutuhkan
1	Koneksi Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walaupun hampir seluruh SOPD telah memiliki jaringan Internet, nampun pengadaannya masih mandiri dan belum seluruh SOPD menggunakan koneksi yang disediakan oleh Diskominfo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh SOPD terhubung dengan jaringan internet yang disediakan secara terpusat oleh SOPD pengelola TIK (Diskominfo)</li> </ul>



No	Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang dibutuhkan
2	Perangkat Komputer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada beberapa SOPD, jumlah komputer tidak sebanding dengan jumlah SDM (terdapat SOPD yang jumlah perangkat komputernya melebihi jumlah SDM, dan sebaliknya).</li> <li>• Jumlah perangkat yang terkoneksi internet hanya 31% dari jumlah komputer/laptop yang tersedia</li> <li>• Masih ada penggunaan sistem operasi yang sudah tidak berlisensi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan jumlah perangkat komputer /laptop pada masing-masing SOPD.</li> <li>• Seluruh SOPD memiliki perangkat keras (komputer dan piranti penunjangnya) kualitas perangkat yang cukup baik, terkoneksi dengan internet untuk mensupport operasional pemerintahan dan layanan publik di SOPD.</li> <li>• Sistem operasi dapat diselenggarakan secara terpusat melalui SOPD pengelola TIK (Diskominfo) dengan menggunakan lisensi korporat</li> </ul>
3	Koneksi LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyak SOPD yang belum memiliki koneksi LAN antar ruang baik menggunakan kabel atau media wireless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap SOPD memiliki LAN yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya di dalam lingkungan SOPD</li> <li>• SOPD yang dalam satu wilayah saling terhubung dalam sebuah WAN</li> </ul>
4	Data Centre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini belum tersedia data centre.</li> <li>• Belum tersedia ruangan yang dijadikan sebagai ruang data centre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dibangun data center yang mempertimbangkan prinsip <i>modularity</i>, <i>flexibility</i>, dan <i>scalability</i>.</li> <li>• Ruangan data center harus memiliki sistem keamanan yang baik selama 24 jam. Harus terdapat SOP hak akses yang jelas, dan bangunan dilengkapi</li> </ul>

No	Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang dibutuhkan
			dengan sistem video keamanan.
5	Regulasi dan kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP pengelolaan sarana dan prasarana TIK</li> <li>• SOP Pengelolaan Data Center</li> <li>• SOP Keamanan Data</li> <li>• SOP Keamanan Jaringan</li> <li>• SOP Incident Handling</li> </ul>

### 3.3.4 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisa gap yang dilakukan pada kondisi SDM meliputi aspek kemampuan TIK pegawai di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, penempatan SM terkait tugas khusus TIK, peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang TIK regulasi/kebijakan yang telah diterapkan. Hasil analisa gap dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Analisa gap sumber daya manusia

No	Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang dibutuhkan
1	Kemampuan TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya 29% dari jumlah total PNS dan tenaga kontrak yang menguasai komputer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap PNS di lingkungan Pemko Palangka Raya memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer seperti office atau sejenis, dan mengoperasikan aplikasi internet.</li> </ul>

No	Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang dibutuhkan
2	Penempatan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada SOPD yang belum memiliki pegawai dengan tugas khusus dalam bidang TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap SOPD dapat menugaskan staff baik itu PNS atau pegawai kontrak yang memiliki kompetensi TIK untuk melakukan tugas khusus yang terkait bidang TIK</li> </ul>
3	Peningkatan kompetensi TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya pelatihan dalam bidang TIK yang diberikan kepada pegawai di tiap SOPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kemampuan SDM pegawai pemerintahan harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara internal ataupun secara eksternal.</li> </ul>
4	Regulasi dan kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi yang menunjuk dan mengatur secara formal tugas pokok dan fungsi CIO.</li> <li>Dokumen yang memuat secara rinci kriteria dan spesifikasi pranata komputer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ul>

Tabel 3.13 Kondisi dan kebutuhan akan perangkat lunak di SOPD

No .	Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Nama Lain	Kondisi Saat Ini	Saran	Catatan
1.	Pelayanan	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kependudukan</li> <li>2. Perpajakan dan Retribusi</li> <li>3. Pendaftaran dan Perijinan</li> <li>4. Bisnis dan Investasi</li> <li>5. Pengaduan Masyarakat</li> <li>6. Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIAK/SIMDUKCA PIL</li> <li>2. SIM Pajak dan Retribusi, SIM Perpajakan, SIMTAP, SAMSAT</li> <li>3. SIM Perijinan, SIM Pelayanan Masyarakat, SIM Pendaftaran</li> <li>4. SIM Bisnis dan Investasi</li> <li>5. SIM Pengaduan Masyarakat</li> <li>6. e-Gov Portal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parsial</li> <li>2. Ada</li> <li>3. Parsial</li> <li>4. Belum ada</li> <li>5. Ada</li> <li>6. Parsial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi fitur untuk kecamatan</li> <li>2. –</li> <li>3. Melengkapi modul perijinan</li> <li>4. Perlu dibangun</li> <li>5. –</li> <li>6. Meningkatkan konten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi dispensasi menikah</li> <li>3. Perijinan lingkungan, IMB</li> </ol>
2.	Administrasi dan management	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Elektronik</li> <li>2. Sistem Dokumen Elektronik</li> <li>3. Sistem Pendukung Keputusan</li> <li>4. Kolaborasi dan Koordinasi</li> <li>5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email, SIM Surat</li> <li>2. Document Management, SIM Arsip</li> <li>3. Decision Support Systems (DSS)</li> <li>4. -</li> <li>5. -</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parsial</li> <li>2. Belum ada</li> <li>3. Parsial (sektoral)</li> <li>4. Belum ada</li> <li>5. Ada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi fitur</li> <li>2. Perlu dibangun</li> <li>3. Melengkapi sektor-sektor yang belum ada</li> <li>4. Perlu dibangun</li> <li>5. -</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Official email untuk seluruh pegawai, SIM surat dan pengarsipan untuk seluruh SOPD</li> </ol>

No .	Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Nama Lain	Kondisi Saat Ini	Saran	Catatan
3.	Legislasi	-	1. Sistem Administrasi DPRD 2. Sistem Pemilu Daerah 3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan	1. – 2. SIM Pemilu 3. SIM Perpu	1. Belum ada 2. Belum ada 3. Ada	1. Perlu dibangun 2. Perlu dibangun 3. -	
4.	Pembangunan	-	1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan	1. Knowledge Management, Document Management, Data Warehouse 2. SimBangDa 3. SimProyek, e-Procurement 4. SimProyek 5. SimBangDa	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada 5. Ada	1. - 2. - 3. - 4. – 5. -	

No .	Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Nama Lain	Kondisi Saat Ini	Saran	Catatan
5.	Keuangan	-	1. Sistem Anggaran 2. Sistem Kas dan Perbendaharaan 3. Sistem Akuntansi Daerah	1. MAKUDA, SIMKEU, SIM Anggaran 2. MAKUDA, SIMKEU, SIM Perbendaharaan 3. MAKUDA, SIMKEU, SIM Akuntansi Daerah	1. Ada 2. Ada 3. Ada	1. - 2. - 3. -	
6.	Keppegawaian	-	1. Pengadaan PNS 2. Sistem Absensi dan Penggajian 3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 4. Sistem Pendidikan dan Latihan	1. SIMPEG 2. Payroll, SIMPEG 3. SIMPEG 4. SIMDIKLAT	1. Parsial 2. Parsial 3. Parsial 4. Belum ada	1. Melengkapi fitur 2. Melengkapi fitur 3. Melengkapi fitur 4. Perlu dibangun	3. E-performance/E-kinerja
7.	Dinas dan Lembaga	Kepemerintahan	1. Pengelolaan Barang Daerah 2. Katalog Barang Daerah 3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. Pengelolaan Perusahaan Daerah	1. SIMBADA 2. - 3. MAPATDA, SIMPENDA 4. SIM Perusahaan Daerah	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada	1. - 2. - 3. - 4. -	

No .	Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Nama Lain	Kondisi Saat Ini	Saran	Catatan
		Kewilayahan	1. Tata ruang dan Lingkungan Hidup 2. Potensi Daerah 3. Kehutanan 4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 5. Perikanan dan Kelautan 6. Pertambangan dan Energi 7. Pariwisata 8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1. SIM Tata Ruang 2. SIMPOTENDA, SIMPROMODA, GIS-SIMPOTENDA 3. SIM Kehutanan 4. SIM Pertanian, SIM Perkebunan 5. SIM Perikanan dan Kelautan, SIM Perikanan, SIM Kelautan 6. SIM Tamben, SIM Pertambangan 7. SIMPAR, SIM Pariwisata 8. SIM IKM, SIM UKM	1. Belum ada 2. - 3. - 4. Belum ada 5. - 6. - 7. Belum ada 8. Belum ada	1. Perlu dibangun 2. – 3. – 4. Perlu dibangun 5. – 6. – 7. Perlu dibangun 8. Perlu dibangun	1. Aplikasi pertanahan untuk kecamatan, Server Induk Command Centre (CC Room) titik api
		Kemasyarakatan	1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Ketenagakerjaan 4. Industri dan Perdagangan 5. Jaring Pengaman Sosial	1. SIMKES 2. SIMDIKDA 3. SIMNAKER 4. SIMINDAG 5. SIM JPS	1. Belum ada 2. Belum ada 3. Belum ada 4. – 5. Belum ada	1. Perlu dibangun 2. Perlu dibangun 3. Perlu dibangun 4. – 5. Perlu dibangun	1. SI Rumah sakit, SI Akreditasi Rumah Sakit 3. Busa kerja daerah 5. Aplikasi data kemiskinan

No .	Blok Fungsi	Sub- Blok Fungsi	Modul	Nama Lain	Kondisi Saat Ini	Saran	Catatan
		Sarana dan prasarana	1. Transportasi 2. Jalan dan Jembatan 3. Terminal dan Pelabuhan 4. Sarana Umum	1. SIM Transportasi 2. – 3. – 4. -	1. Belum ada 2. Belum ada 3. Belum ada 4. Belum ada	1. Perlu dibangun 2. Perlu dibangun 3. Perlu dibangun 4. Perlu dibangun	SI Kebinamargaan



### 3.4 Analisa SWOT

Dalam penyusunan dokumen Master Plan TIK Pemerintah Kota Palangka Raya, selain dilakukan analisis gap terhadap hasil kuesioner dilakukan pula analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity* dan *Threat*). Tujuan analisa SWOT ini adalah memetakan kondisi pemanfaatan TIK dengan meninjau faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahannya serta faktor eksternal berupa peluang dan tantangan yang dihadapi pada saat ini.

Komponen pokok yang akan dianalisis, yaitu infrastruktur dan perangkat keras, aplikasi/perangkat lunak, sumber daya manusia, ketersediaan data dan kebijakan pemerintah terkait TIK. Hasil analisis SWOT ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa masalah utama sebagai dasar penentuan rencana pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan merumuskan solusi yang akan dijalankan. Tabel 3.14 berisi hasil penyusunan analisis SWOT terhadap kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Tabel 3.14 Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	
STRENGTHS (+)	WEAKNESSES (-)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan di lingkungan Pemko Palangka Raya saat ini untuk memajukan TIK</li><li>2. Sudah adanya SOPD yang secara khusus menangani bidang TIK di lingkungan Pemko Palangka Raya, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li><li>3. Lokasi SOPD yang sebagian besar berada dalam satu kompleks perkantoran</li><li>4. Seluruh SOPD telah memiliki infrastruktur dasar seperti listrik dan telepon.</li><li>5. Lebih dari 90% SOPD telah terhubung dengan internet</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum ada rencana pengembangan TIK di lingkungan Pemko Palangka Raya sehingga pengembangan TIK masih bersifat sporadis dan rentan overlap secara pendanaan.</li><li>2. Dinamika politik di lingkungan Pemko Palangka Raya; di mana berpeluang untuk berubahnya kebijakan dan komitmen terhadap pengembangan TIK setiap kali berubah kepemimpinan</li><li>3. Perangkat keras, dan perangkat lunak TIK yang belum sepenuhnya memadai</li><li>4. Sumber daya manusia TIK yang belum merata di seluruh SOPD</li></ol>
FAKTOR EKSTERNAL	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Otonomi daerah, termasuk di dalamnya otonomi untuk mengembangkan TIK.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkembangan TIK yang cepat</li><li>2. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan dan informasi yang cepat dan akurat</li></ol>

2. Apresiasi dan dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengembangan pemanfaatan TIK 3. Semangat ‘maju bersama’ dari daerah-daerah yang telah maju dalam hal pemanfaatan TIK dengan bersedia menjadi percontohan 4. Antusiasme masyarakat dalam mendukung pemerintah daerah. 5. Adanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta yang memiliki jurusan Teknik Informatika di Kota Palangkaya. a. SDM b. Kerja sama 6. Tersedianya perangkat lunak <i>open source</i> , dan konten pembelajaran TIK yang banyak tersedia dan mudah diakses 7. Hubungan yang baik dengan instansi lain (misalnya Polda Kalimantan Tengah) dalam hal jejaring pengembangan TIK	3. Luasnya area administratif Kota Palangka Raya 4. Suplai listrik di wilayah Kalimantan Tengah yang belum stabil 5. Belum optimalnya koordinasi instansi lintas sektor
--	---

Berdasarkan hasil analisa SWOT yang ada di Table 3.14, maka dapat dirancang strategi untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi tantangan dalam implementasi pemanfaatan TIK di Kota Palangka Raya. Hasil analisis strategis ini dijabarkan dalam Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Analisa strategis SWOT

Strategi untuk menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Tantangan (ST)	Strategi mengatasi Kelemahan untuk menghadapi Tantangan (WT)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan-kebijakan TIK; seperti dalam hal tata kelola TIK, simplifikasi proses bisnis, dan pertukaran data.</li> <li>2. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar instansi lintas sektoral; terutama dalam hal pertukaran data.</li> <li>3. Meningkatkan peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai koordinator dalam pengembangan TIK terpadu di lingkungan Pemko Palangka Raya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekrutmen tenaga TIK dengan kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan keahlian jabatan Pranata Komputer</li> <li>2. Meningkatkan layanan berbasis TIK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tersebar di area administratif yang luas akan informasi yang cepat dan akurat</li> <li>3. Meningkatkan infrastruktur TIK, perangkat keras, dan perangkat lunak secara bertahap; termasuk mempertimbangkan cadangan/<i>backup</i> listrik</li> </ol>
Strategi untuk menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Tantangan (ST)	Strategi mengatasi Kelemahan untuk menghadapi Tantangan (WT)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan komitmen dari pemimpin saat ini, memanfaatkan otonomi yang ada untuk menetapkan arah pengembangan TIK sesuai kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.</li> <li>2. Mengupdate keahlian pegawai yang menangani bidang TIK di lingkungan Pemko Palangka Raya secara berkala; baik melalui program-program pemerintah pusat maupun melalui pelatihan yang diprakarsai Pemko Palangka Raya sendiri.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan TIK di lingkungan Pemko Palangka Raya secara umum melalui program kerja sama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan perguruan tinggi setempat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rencana pengembangan TIK dengan melibatkan unsur akademisi, masyarakat, dan jejaring instansi lain.</li> <li>2. Mengadopsi penerapan TIK dari daerah lain yang lebih maju.</li> <li>3. Bekerja sama dengan PTN/PTS setempat dalam hal rekrutmen SDM. Baik yang bersifat temporal (misalnya Kerja Praktek), maupun yang bersifat tetap.</li> <li>4. Meningkatkan pengetahuan SDM TIK di lingkungan Pemko Palangka Raya dengan memanfaatkan konten pembelajaran TIK yang banyak tersedia dan mudah diakses</li> <li>5. Penggunaan perangkat lunak <i>opensource</i> di lingkungan Pemko Palangka Raya sebagai alternatif aplikasi berbayar</li> </ol>

## BAB IV

### REKOMENDASI DAN ROAD MAP PENGEMBANGAN TIK

#### 4.1 Rekomendasi dan Rencana Strategis

Penerapan TIK di pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis transparansi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Sesuai dengan yang telah digariskan dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dalam paragraf Tujuan Pengembangan e-Government yang diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama, yaitu :

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dalam kerangka ini fungsi TIK dalam dunia pemerintahan tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan *driver of change* atau menjadi penentu perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat menuju ke kondisi ideal dalam pengembangan *e-government*, pemerintah Kota Palangka Raya harus menetapkan prioritas pengembangan TIK dalam jangka panjang yang harus dicapai. Adapun skala prioritas tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok seperti yang dipaparkan dalam Tabel berikut.

Berdasarkan analisa hasil kuesioner, strategi yang dapat dijalankan untuk mendapatkan kondisi ideal pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Strategi Implementasi Master Plan TIK Kota Palangka Raya

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output
<b>Tata Kelola TIK</b>				
1.	Pembentukan Organisasi Fungsional pada tataran strategis (CIO/Dewan TIK)	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Pembentukan CIO / Dewan TIK	Organisasi Fungsional
2.	Pembentukan jabatan atau posisi khusus SDM pengelola TIK dan kebijakan legalitas pengelola TIK di SOPD	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Pembentukan jabatan atau posisi khusus SDM pengelola TIK dan Kebijakan legalitas pengelola TIK di SOPD	Perwali tentang pengelola TIK di tiap SOPD
3.	Pembentukan fungsi kerja TIK sebagai Helpdesk dan monitoring jaringan SOPD	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Restrukturisasi SOPD Dinas Kominfo	Efisiensi dan Efektifitas implementasi e-government
4.	Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK terintegrasi	Program Pengembangan Kelembagaan TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan SOP Pengelolaan Sarana TIK</li> <li>• Penyusunan SOP Pengelolaan Data Centre</li> <li>• Penyusunan SOP Keamanan Data</li> <li>• Penyusunan SOP Keamanan Jaringan</li> <li>• Penyusunan SOP Incident Handling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwali tentang panduan teknis pengelolaan sarana dan prasarana TIK</li> <li>• Perwali tentang panduan teknis Pengelolaan Data Center</li> <li>• Perwali tentang panduan teknis</li> </ul>

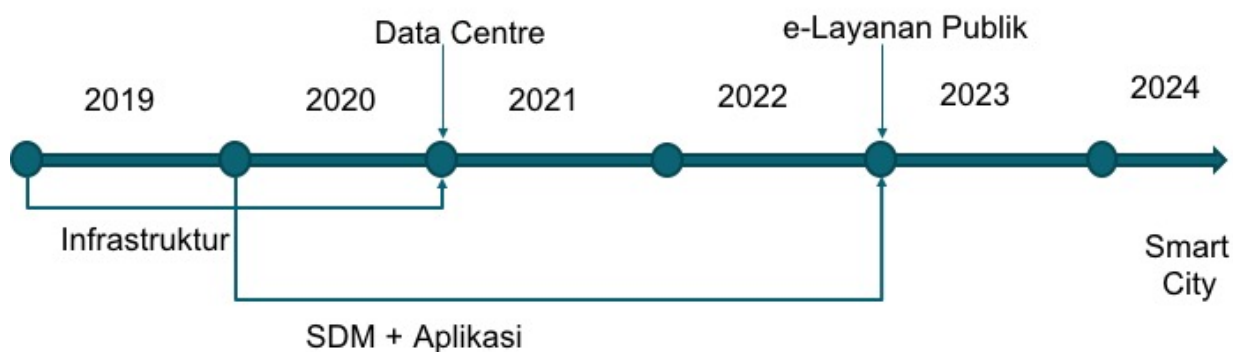
				Keamanan Data Pemerintah Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwali tentang panduan teknis keamanan jaringan</li> <li>• Perwali tentang panduan teknis Incident Handling</li> </ul>
<b>Infrastruktur – Perangkat Keras</b>				
1.	Percepatan pengembangan dan pengelolaan Datacenter	Pengembangan sarana dan prasarana TIK	Pembangunan data center	Peningkatan layanan infrastruktur internal lingkup Pemko Palangka Raya
2.	Percepatan pembangunan koneksi jaringan antar SOPD	Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan koneksi LAN di tiap SOPD dan WAN antar SOPD</li> <li>• Pembangunan koneksi fiber optik untuk koneksi antar SOPD di lingkungan Pemko Palangka Raya</li> <li>• Penyambungan koneksi internet di tiap SOPD yang terpusat di Diskominfo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan layanan infrastruktur TIK</li> <li>• Peningkatan jaminan availability akses</li> </ul>
3.	Pengelolaan infrastruktur TIK di SOPD	Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peremajaan komputer/ laptop yang sudah tidak dapat terkoneksi dengan internet</li> </ul>	Peningkatan kinerja PNS dan layanan masyarakat

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelian lisensi korporate baik untuk sistem operasi maupun perangkat lunak lainnya</li> </ul>	
<b>Perangkat Lunak – Aplikasi</b>				
1.	Pengembangan aplikasi e-government, dimana setiap SOPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap	Pengembangan Aplikasi dan Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan aplikasi dan sistem Informasi untuk Pelayanan Publik</li> <li>Pengembangna aplikasi dan sistem Informasi untuk administrasi Pemerintahan</li> </ul>	
2.	Pemanfaatan aplikasi/software yang didapat dari hasil MoU dengan pemerintah daerah lain. Misalnya dengan Kab. Banyuwangi	Pengembangan Aplikasi dan Data Elektronik	Transfer teknologi pengembangan sistem informasi/aplikasi dengan pemerintah daerah lain	Pengembangan sistem informasi/aplikasi
3.	Pengembangan kembali website Pemerintah Kota Palangka raya dan sub domain web SOPD yang terintegrasi	Pengembangan Aplikasi dan Data Elektronik	Pengembangan website	Pengembangan website
4	Sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di SOPD	Pengembangan Aplikasi dan Data Elektronik	Koordinasi Pengelolaan Data yang terpusat dan dikelola oleh SOPD yang ditugaskan	Pengamanan data dan informasi Pemerintah Kota
5	Standardisasi pengembangan aplikasi dan	Pengembangan Aplikasi dan Data Elektronik	Penyusunan standarisasi proses pengembangan, implementasi dan	Acuan penyusunan

	pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas.		pemeliharaan serta dokumentasi aplikasi yang berlaku untuk seluruh unit kerja.	Sistem informasi dan aplikasi pemerintah kota.
<b>Sumber Daya Manusia</b>				
1.	Peningkatan kualitas pengelola TIK di semua SKPD serta pendistribusiannya	Pengembangan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan terkait aplikasi perkantoran</li> <li>• Pelatihan terkait manajemen website</li> <li>• Pelatihan bagi operator aplikasi</li> <li>• Pelatihan dan Serifikasi Kemampuan TIK</li> </ul>	Revitalisasi SDM
2.	Peningkatan kuantitas pengelola TIK di semua SOPD serta pendistribusiannya	Peningkatan kuantitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan staff baik PNS atau pegawai kontrak untuk tugas khusus yang terkait bidang TIK</li> </ul>	Revitalisasi SDM

## 4.2 Roadmap Implementasi

Penyusunan roadmap dan program kerja pengembangan TIK perlu diberikan target tiap tahunnya untuk menjadi evaluasi terhadap secara keseluruhan perencanaan. Roadmap pengembangan TIK di Kota Palangka Raya dibuat untuk jangka waktu lima tahun, mulai tahun 2019 – 2024. Adapun gambaran besar roadmap pengembangan TIK ini dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Roadmap Implementasi Pengembangan TIK Kota Palangka Raya



Target per tahun adalah sebagai berikut:

- Tahun 2019 : Penguatan Infrastruktur

Penguatan infrastruktur meliputi melengkapi konektivitas utama (*backbone network*) untuk memastikan seluruh SOPD dapat terkoneksi. Selain itu perencanaan untuk pembangunan pusat data (data center) dimulai di tahun ini bersamaan dengan pengadaan perangkat jaringan untuk kebutuhan data centre dan konektivitas antar SOPD.

- Tahun 2020 : Penguatan Infrastruktur, SDM dan Aplikasi

Di tahun kedua yaitu tahun 2020, difokuskan pada pembangunan data centre dan peningkatan kemampuan SDM untuk mengelola data centre dan jaringan. Selain itu pengembangan aplikasi sistem informasi mulai dapat dimulai, hal ini dimungkinkan dengan melakukan transfer teknologi dengan pemerintah daerah lain

- Tahun 2021 : Penguatan SDM, Aplikasi dan Tata Kelola TIK

Pada tahun ketiga, difokuskan pada persiapan pemanfaatan e-Layanan publik. Oleh karena itu, perlunya kemampuan literasi digital dari pegawai di SOPD terkait. Selain itu, perumusan standar prosedur terkait kegiatan pemanfaatan TIK dapat dilaksanakan.

- Tahun 2022 : Pemanfaatan e-Layanan Publik

Pada tahun keempat, diharapkan e-Layanan publik telah siap ditunjang dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan TIK pegawai terutama operator aplikasi.

- Tahun 2023 : Menuju pelaksanaan Smart City

Di tahun kelima, diharapkan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah siap untuk mengimplementasikan dimensi Smart City.

Timeline pengembangan keseluruhan target pengembangan TIK di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada subsection dibawah ini. Timeline ini sebagai panduan dan referensi pengembangan Teknologi Informasi selama lima tahun mendatang. Realiasi penerapan timeline ini dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi di Pemerintah Kota Palangka Raya

#### **4.2.1 Infrastruktur TIK**

Pengembangan infrastruktur/perangkat keras di lingkungan SOPD Kota Palangka Raya dapat dimulai dari tahun 2019, diharapkan pada tahun ke 3 pembangunan Data Centre sudah selesai dan

siap untuk dipergunakan. Peremajaan komputer/laptop dan perangkat keras lainnya dapat dilakukan secara bertahap dan bersinambungan sehingga diharapkan kedepannya, tiap SOPD memiliki perangkat keras dengan kualitas yang baik.

Tabel 4.2 Roadmap Infrastruktur TIK

\*) Tahun 1: 2019; Tahun 2: 2020; Tahun 3: 2021; Tahun 4: 2022; Tahun 5: 2023.

No	Uraian	Tahun*)				
		1	2	3	4	5
1	Pengembangan kualitas perangkat keras					
	• Peremajaan komputer/laptop		x	x	x	x
	• Pembelian lisensi korporat baik untuk sistem operasi maupun perangkat lunak lainnya			x		
2	Pembangunan koneksi jaringan					
	• Perencanaan koneksi LAN di tiap SOPD dan WAN antar SOPD	x				
	• Penyelenggaraan internet yang terpusat di Diskominfo	x				
	• Pembangunan koneksi LAN internal SOPD		x			
	• Pembangunan koneksi koneksi antar SOPD di lingkungan Pemko Palangka Raya			x	x	
3	Data Centre					
	• Desain fasilitas dan infrastruktur data centre	x				
	• Pembangunan ruang data centre		x	x		
	• Pengadaan perangkat jaringan		x	x		
	• Pengembangan keamanan TIK			x	x	
	• Sertifikasi Uptime				x	x
4	Command Centre				x	x

#### 4.2.2 Perangkat Lunak dan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan aplikasi sistem informasi dimulai bersamaan dengan pembangunan infrastruktur jaringan antar SOPD di Kota Palangka Raya. Hal ini dikarenakan, aplikasi sistem informasi yang dikembangkan terkait dengan administrasi pemerintahan dan aplikasi pelayanan publik. yang memerlukan setiap SOPD dapat saling terkoneksi dalam hal pertukaran data dan informasi. Di tahun-tahun pertama, pengembangan aplikasi sistem informasi difokuskan pada pelayan publik berbasis elektronik, diharapkan pada awal tahun keempat (awal tahun 2022) masyarakat umum sudah dapat mengakses aplikasi pelayanan publik terkait. Bersamaan dengan pengembangan aplikasi pelayanan public, aplikasi sistem informasi administrasi pemerintahan juga dikembangkan. Untuk kurun waktu lima tahun ke depan, pengembangan aplikasi sistem informasi dapat dilaksanakan dengan melakukan transfer teknologi pengembangan aplikasi sistem informasi dengan pemerintah daerah yang memiliki MoU dengan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Tabel 4.3 Roadmap Perangkat Lunak dan Aplikasi Sistem Informasi

Tahun 1: 2019; Tahun 2: 2020; Tahun 3: 2021; Tahun 4: 2022; Tahun 5: 2023.

Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Catatan	Tahun				
				1	2	3	4	5
Pelayanan	-	1. Kependudukan	1. Aplikasi dispensasi menikah		x			
		2. Pendaftaran dan Perijinan	2. Perijinan lingkungan, IMB		x			
		3. Bisnis dan Investasi				x		
		4. Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan			x			
Administrasi dan management	-	1. Surat Elektronik	1. Official email untuk seluruh pegawai, SIM surat dan pengarsipan untuk seluruh SOPD		x			
		2. Sistem Dokumen Elektronik			x			
		3. Sistem Pendukung Keputusan				x		
		4. Kolaborasi dan Koordinasi				x		
Legislasi	-	1. Sistem Administrasi DPRD						x
		2. Sistem Pemilu Daerah						x

Blok Fungsi	Sub-Blok Fungsi	Modul	Catatan	Tahun				
				1	2	3	4	5
Kepegawaian	-	1. Pengadaan PNS				x		
		2. Sistem Absensi dan Penggajian			x			
		3. Sistem Penilaian Kinerja PNS	3. E-performance/E-kinerja		x			
		4. Sistem Pendidikan dan Latihan					x	
Dinas dan Lembaga	Kewilayahan	1. Tata ruang dan Lingkungan Hidup	1. Aplikasi pertanahan untuk kecamatan, Server Induk Command Centre (CC Room) titik api			x		
		2. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan						x
		3. Pariwisata					x	
		4. Industri Kecil dan Menengah (IKM)						x
	Kemasyarakatan	1. Kesehatan	1. SI Rumah sakit, SI Akreditasi Rumah Sakit		x			
		2. Pendidikan				x		
		3. Ketenagakerjaan	3. Busa kerja daerah			x		
		4. Jaring Pengaman Sosial	4. Aplikasi data kemiskinan			x		
	Sarana dan prasarana	1. Transportasi	SI Kebinamargaan				x	
		2. Jalan dan Jembatan					x	
		3. Terminal dan Pelabuhan						x
		4. Sarana Umum						x

#### 4.2.3 Sumber Daya Manusia

Roadmap peningkatan kemampuan TIK untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dimulai pada tahun kedua yaitu tahun 2020. Peningkatan kemampuan pegawai ini meliputi pelatihan komputer dasar baik bagi pegawai biasa ataupun operator aplikasi sistem informasi. Pelatihan dan sertifikasi untuk beberapa bidang TIK terkait dengan pengelolaan Data centre dan jaringan juga perlu dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pengelolaan data centre yang baik. Pelatihan dan sertifikasi terkait database dan programming perlu diberikan kepada pegawai, baik di Diskominfo atau SOPD lain, agar kedepannya pemerintah kota Palangka Raya dapat mengembangkan sendiri aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan.

Tabel 4.4 Roadmap Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan kemampuan TIK					
	• Pelatihan aplikasi perkantoran untuk perwakilan masing-masing SOPD			x		x
	• Pelatihan manajemen website untuk perwakilan masing-masing SOPD		x		x	
	• Pelatihan bagi operator aplikasi yang diimplementasikan di SOPD terkait		x	x	x	x
2	Pelatihan dan sertifikasi di bidang:					
	• Data center			x		x
	• Administrasi jaringan komputer		x		x	
	• Statistik dan pengolahan data			x		x
	• Analisis dan desain basis data			x		x
	• Programing		x		x	
	• Tata kelola & manajemen TI		x		x	

#### 4.2.4 Tata Kelola TIK

Roadmap tata kelola TIK berisi rencana penataan kelembagaan dan pembuatan standar prosedur pemanfaatan TIK dalam kurun waktu lima tahun.

Tabel 4.5 Roadmap Tata Kelola TIK

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembuatan Peraturan Walikota tentang Master Plan TIK	x				
2	Pembentukan Dewan TIK dan CIO	x				
3	Pembuatan standar prosedur pemanfaatan TIK					
	• Pedoman pembangunan perangkat lunak dan standarisasi data		x			
	• SOP Pengelolaan Sarana TIK		x			
	• SOP Pengelolaan Data Centre			x		
	• SOP Keamanan Data			x		
	• SOP Keamanan Jaringan				x	
	• SOP Incident Handling					x
4	Evaluasi dan review Masterplan		x	x	x	x

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam menunjang pelayanan masyarakat dan adopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dibutuhkan sistem yang dapat menunjang peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal ini juga sehubungan dengan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Palangka Raya yang menjadikan Kota Palangka Raya sebagai kota yang MAJU, RUKUN dan SEJAHTERA.

Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Palangka Raya ini memuat perencanaan global pengembangan TIK di Kota Palangka Raya tahun 2019 – 2024. Master Plan TIK adalah *living document* yang selanjutnya perlu dilakukan pembaharuan setiap tahun sesuai dengan dinamika dan perkembangan di Kota Palangka Raya. Pembaharuan dokumen Master Plan TIK ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor kebutuhan internal maupun faktor eksternal terkait kebijakan dan lingkungan strategis. Pembaharuan ini perlu didokumentasikan dengan pengelolaan yang baik dan disosialisasi secara tepat kepada pihak-pihak terkait.

# LAMPIRAN



**Lampiran 1. Daftar website yang dimiliki oleh SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya**

No	Nama SOPD	Alamat URL	Hosting	Status
1	Sekretariat Daerah	-	-	
2	Sekretariat DPRD	<a href="http://sekretariatdprd.palangkaraya.go.id">sekretariatdprd.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, tidak up to date
3	Inspektorat	<a href="http://inspektorat.palangkaraya.go.id">inspektorat.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
4	Dinas Pendidikan	<a href="http://disdik.palangkaraya.go.id">disdik.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
5	Dinas Kesehatan	<a href="http://dinkes.palangkaraya.go.id">dinkes.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
6	Dinas Sosial	<a href="http://dinsos.palangkaraya.go.id">dinsos.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
7	Dinas Perhubungan	<a href="http://dishub.palangkaraya.go.id">dishub.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<a href="http://disbudpar.palangkaraya.go.id">disbudpar.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<a href="http://pupr.palangkaraya.go.id">pupr.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, tidak up to date
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<a href="http://prkp.palangkaraya.go.id">prkp.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, tidak up to date
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://kukm.palangkaraya.go.id">kukm.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<a href="http://ketpang.palangkaraya.go.id">ketpang.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, tidak up to date
13	Dinas Perikanan	-	-	-
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<a href="http://disdalduk.palangkaraya.go.id">disdalduk.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, tidak up to date
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup	<a href="http://dlh.palangkaraya.go.id">dlh.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<a href="http://dpmptsp.palangkaraya.go.id">dpmptsp.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<a href="http://dpkp.palangkaraya.go.id">dpkp.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date

No	Nama SOPD	Alamat URL	Hosting	Status
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dpk.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, tidak up to date
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	kominforminfo.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	disperindag.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
22	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, tidak up to date
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	dukcapil.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<a href="http://bpkad.palangkaraya.go.id">bpkad.palangkaraya.go.id</a>	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
26	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	bpprd.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, tidak up to date
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	balitbangkota.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
31	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	-	-	-
33	Kecamatan Jekan Raya	kec-jekeanraya.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
34	Kecamatan Pahandut	kec-pahandut.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, up to date
35	Kecamatan Sabangau	kec-sabangau.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Tidak aktif
36	Kecamatan Bukit Batu	kec-bukitbatu.palangkaraya.go.id	diskominfo kota P.Raya	Aktif, tidak up to date
37	Kecamatan Rakumpit	-	-	-

**Lampiran 2. Daftar Aplikasi yang dimiliki oleh SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya**

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
1	Sekretariat Daerah	SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	LKPP/LPSE	Barang/jasa pemko Palangka Raya	Web
2	Sekretariat DPRD	SIMDA	Aplikasi keuangan	BPKAD		Desktop
		SIMPEG	Aplikasi kepegawaian	BKPP		Web
		SISAKIP	Aplikasi LKIP	Inspektorat		Web
3	Inspektorat	SAKIP/LAKIP	Mengelola target realisasi dan tujuan setiap SKPD	Inspektorat Kota P. Raya	target, realisasi, dan tujuan tiap SKPD	Web
		SIMTLP	Mengelola tindak lanjut temuan BPK RI	Inspektorat Kota P. Raya	Tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan reguler (pemeriksaan internal)	Web
4	Dinas Pendidikan	Dapodik	Mengelola data sekolah			Web
5	Dinas Kesehatan	KOMDAT	Komunikasi data	Kemenkes	Laporan data bulanan, triwulan, tahunan, SPM	Web
		RENBUT	Renbut Nakes	pemko	data ketenagaan	web
		SISDMK	SISDMK	pemko	Deskripsi nakes di kota Palangka Raya	web
		SIPNAP	Sistem pelaporan narkotik dan psikotropika	Kemenkes	Pelaporan narkotika dan psikotropika, apotek, klinik dan RS	Web
		SIMADA	Sistem pemutakhiran data	Kemenkes	Sarana farmasi IFK, DAK Farmasi dan tenaga farmasi	web
		E-DESK	Desk DAK YANFAR	Kemenkes	Usulan DAK YANFAR	web

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
		E-Monev Obat	Monitoring dan evaluasi katalog obat	Kemenkes	RKO Dinkes dan RS, realisasi penerimaan obat, pembayaran dan monitoring	Web
		farmasi.dinkeskalteng.net		Dinkes Provinsi	Penggunaan obat tradisional dan pelayanan kefarmasian PKM dan RS	web
6	Dinas Sosial	SIMDA		BPKAD	Perencanaan, keuangan dan aset SOPD	Web
		SIPD		Kemendagri	Jaringan data terpadu di daerah dan di pusat	Web
		SIPPD		Bappeda		Web
		SIMPPD		Bappeda	realisasi fisik dan keuangan	Web
		SIMLTP		Inspektorat	tindak lanjut LHP	Web
		e-Formasi		KemenPAN	Bezeting ASN, Anjab dan ABK	Web
		PPID		PEMKO	Layanan informasi publik	Web
		SIMPEG		PEMKO	Data kepegawaian	Web
		LAPOR		Kantor Kepresidenan	layanan aduan	Web
		SIRUP		LKPP	rencana umum pengadaan bara/jasa	Web
7	Dinas Perhubungan	Website profil perhubungan	-	Dishub	-	Web
		Aplikasi PKB	-	Dishub	-	Desktop

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
		Aplikasi SI Angkutan dalam trayek	-	Dishub	-	Web
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMDA	Aplikasi keuangan	BPKAD	Data keuangan	Web
		SIMDA BMD	Aplikasi aset	Bagian Aset	data aset dan BMD	Web
		SIMPPD	Aplikasi laporan realisasi fisik	Bappeda	Data laporan realisasi fisik	Web
		SIMONEV	aplikasi laporan realisasi keuangan	Bappeda	Data laporan realisasi keuangan	Web
		SIMPEG	Aplikasi kepegawaian	BKPP	Data pegawai	Web
		SIMLTP	aplikasi tindak lanjut pemeriksaan	Inspektorat	Data tindak lanjut pemeriksaan	Web
		SAKIP	aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Inspektorat	Data akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Web
		SIPD	aplikasi sistem informasi pembangunan daerah	Bappeda	Data informasi pembangunan daerah	Web
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	SI Detektif Sampah	Sistem informasi pemantau pergerakan angkutan sampah	PRKP	Pergerakan angkutan sampah, rute, jalur	GPS Mobile Website
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Si Romi	Titik letak UMKM	DKUKM	Data UKM yang berijin dan tidak	Desktop
		Aplikasi pengembangan sistem UKM	Data dari kelurahan dan kecamatan	DKUKM		Web

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	LAPOR; LHKPN;e-FORMASI;SIMDA KEUANGAN; SIMPEG; SIMDA BARANG; SIPD; SIPPD; SAKIP; SIMDA PERENCANAAN; SIRUP		Pemko Palangka Raya		
13	Dinas Perikanan	SIMPEG	Kepegawaian	BKPP	Kepegawaian	Website
		SIMDA	-	BPKAD	-	Desktop
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perijinan	aplikasi perijinan online	DPMPTSP	Perijinan	Website
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Forweb Mobdam	Layanan informasi dan emergency call	DPKP	Kebakaran dan penyelamatan	-
		e-Formasi	Layanan kepegawaian	BKPP	Kepegawaian	
		SIMDA Perencanaan	Perencanaan	Bappeda	Perencanaan	
		SIMDA Keuangan	Keuangan	BPKAD	RKA/DPA/DPPA/RKAP	

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
		SIMDA Barang	Pengelolaan aset	BPKAD	Aset	
		LHKPN	Laporan Harta kekayaan	KPK	Laporan Harta kekayaan	
		SIMLTP	Tindak lanjut temuan	Inspektorat	Laporan Harta kekayaan BPK	
		SAKIP	Laporan akuntabilitas kinerja	Inspektorat	Laporan akuntabilitas kinerja	
		SIMPPD	Laporan realisasi	Bappeda	Laporan SPJ	
		SIRUP	Perencanaan dan pengadaan Barang Jasa	Setda	Laporan pengadaan BJ	
		e-Monev	Laporan Teptra	Setda	Laporan Teptra	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	INLISLITE	Aplikasi otomasi perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital/mengelola dan melayani koleksi digital	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Koleksi digital	Dekstop
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	sandi.palangkaraya.go.id	Sistem penetapan tingkat kerahasiaan informasi berklarifikasi	Kominfo	persandian	web
		ppid.palangkaraya.go.id	sistem informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi	Kominfo	pejabat pengelola informasi dan dokumentasi	web
		simentel.palangkaraya.go.id	sistem pengelolaan manajemen	Kominfo	menara telekomunikasi	web

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
			telekomunikasi berbasis android dan web			
		mail.palangkaraya.go.id	email resmi kominfo	Kominfo	email	web
		mediacenter.palangkaraya.go.id	sistem informasi pusat berita pemko palangka raya	Kominfo	berita	web
		monevin.kominfo.palangkaraya.go.id	sistem informasi monitoring evaluasi kinerja	Kominfo	monitoring evaluasi kinerja	web
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
22	Dinas Tenaga Kerja	Ayokitakerja (BKOL)	-	Kemnaker	IPK	Web
		TKA Online	-	Kemnaker	TKA	Web
		SIMDA Keuangan	Penyusunan RKA	BPKAD	RKA	Desktop
		SIMDA BMD	-	BPKAD	Aset	Desktop
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya	SIAK	Informasi kepegawaian dari seluruh ASN di Kota Palangka Raya	Kementrian dalam negeri	Data penduduk	Web dan desktop
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	SIMPEG		BKPP	Informasi Kepegawaian	Web
		JFT (Jabatan Fungsional tertentu)	Distribusi jabatan fungsional tertentu	BKPP	JFT di kota P. Raya	Web
		SIPERJAKA	Penempatan seseorang dalam posisi/jabatan tertentu	BKPP	Data pejabat eselon dan JFT/JFU	Web



No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
		SMART ASET	Monitoring aset	BKPP	Data aset BKPP	Android dan web based
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SIMDA Keuangan		BPKAD	Keuangan	Desktop
		SIMDA BMD		BPKAD	Barang milik daerah	Dekstop
		SIR BMD		BPKAD	Barang milik daerah	Web
		SIPKD		BPKAD	Keuangan	Web
		SIONDHI		BPKAD	Hibah	Web
		SIMGaji		Taspen	Gaji induk	Desktop
		OMSPAN		KemenKeu	DAK Fisik	Web
		ALADIN		DJP	DAK Non Fisik	Web
		Sinergi		KemenKeu	Laporan SIM Gaji	Web
26	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Simpatda	Aplikasi pelunasan dan data pajak daerah	BPPRD	Pajak daerah	Web
		Surat menyurat	aplikasi surat menyurat	BPPRD	data surat menyurat	desktop
		Aplikasi SIG	aplikasi pemetaan PBB	BPPRD	data pemetaan WP PBB	desktop
		Aplikasi BPHTB	Aplikasi untuk perhitungan BPHTB	BPPRD	Data BPHTB	Web
		PBB Sismiop/SIM PBB	Aplikasi PBB	BPPRD	Data WP PBB	Desktop/ server
		Aplikasi gateway	Aplikasi server/host to host	BPPRD	Penyokong server	web
		SPPT PBB P2 Online	Aplikasi untuk melikat data PBB	BPPRD	Data PBB	web

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
		Aplikasi display kepuasan wajib pajak	Aplikasi display kepuasan wajib pajak	BPPRD	Data hasil voting dan pemilihan tingkat kepuasan WP	Desktop
		TP Client	aplikasi jembatan untuk pembayaran pajak keliling	BPPRD	Data PBB/Payment	Desktop
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	SIMDA	Aplikasi keuangan	BPKAD	Data keuangan	Web
		SIMDA BMD	Aplikasi aset	Bagian Aset	data aset dan BMD	Web
		SIMPPD	Aplikasi laporan realisasi fisik	Bappeda	Data laporan realisasi fisik	Web
		SIMONEV	aplikasi laporan realisasi keuangan	Bappeda	Data laporan realisasi keuangan	Web
		SIMPEG	Aplikasi kepegawaian	BKPP	Data pegawai	Web
		SIMLTP	aplikasi tindak lanjut pemeriksaan	Inspektorat	Data tindak lanjut pemeriksaan	Web
		SAKIP	aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Inspektorat	Data akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Web
		SISIP	aplikasi sistem informasi surat ijin penelitian	Balitbangda	Data informasi penerbitan surat ijin penelitian	Web
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIMPPD	Realisasi fisik dan keuangan SOPD Pemko P.Raya	Bappeda/PT. Global Intermedia	Realisasi penyerapan anggaran dan barang jasa	Web
		SIMONEV	Evaluasi RKPD	Bappeda/PT. Global Intermedia	Evaluasi RKPD	Web
		SIPPD	Musrenbang RKPD, konsistensi program kegiatan dan renja OPD	Bappeda/PT. Global Intermedia	Renja dan RKPD Usulan	Web

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
		SIMDA Perencanaan	Dokumen RPJMD dan Renstra	BPKP	RPJMD dan Renstra	Desktop
		KRISNA DAK	Usulan dana DAK	Bappenas	Program kegiatan daerah	Web
		SIPD/e-database	SIPD adalah sistem/aplikasi terkait pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen rencana pembangunan secara elektronik	Dirjen Bina Bangda, Kemendagri	Data e-database	Web
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SIMDA	Aplikasi keuangan	BPKAD	Data keuangan	Web
		SIMDA BMD	Aplikasi aset	Bagian Aset	data aset dan BMD	Web
		SIMPPD	Aplikasi laporan realisasi fisik	Bappeda	Data laporan realisasi fisik	Web
		SIMONEV	aplikasi laporan realisasi keuangan	Bappeda	Data laporan realisasi keuangan	Web
		SIMPEG	Aplikasi kepegawaian	BKPP	Data pegawai	Web
		SIMTLP	aplikasi tindak lanjut pemeriksaan	Inspektorat	data tindak lanjut pemeriksaan	Web
		SAKIP	aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Inspektorat	data akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Web
		SIPD	aplikasi sistem informasi pembangunan daerah	Bappeda	Data informasi pembangunan daerah	Web
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIMDA	Aplikasi keuangan	Pemko Palangka Raya	Keuangan, perancangan barang/jasa	

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
31	Satuan Polisi Pamong Praja	SIMDA		BKPAD	Keuangan,aset dan perencanaan	Desktop
		SIPD		Bappeda	Data OPD	Web
		SAKIP		Inspektorat	Laporan Kinerja	Web
		SIMPPD		BPKAD	Keuangan dan perencanaan	Web
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	SIMPEG; Eformasi	Tenaga	KemenPAN RB	Data pegawai dan kebutuhan pegawai	Web
		ESDMK, Renbut	Tenaga	Kemenkes		Web
		E-Planning, PPT, PBE	Perencanaan	Kemenkes	Alkes; tenaga	Web
		ASPAK, SIMBADA	Barang	Kemenkes	Alkes; tenaga	Web
		E-Monev,E-renggar, RS Online	Pelayanan/evaluasi	Kemenkes	Pelayanan rujukan	Web
33	Kecamatan Jekan Raya	Website		Diskominfo	Berita kecamatan jekan raya	Web
		LAPOR		Diskominfo	Laporan masyarakat	
34	Kecamatan Pahandut	Website kec-pahandut.palangkaraya.go.id	berisi informasi kecamatan pahandut	Kec. Pahandut		Website
35	Kecamatan Sabangau	SIMDA	Aplikasi keuangan	BPKAD	Data keuangan	Web
		SIMDA BMD	Aplikasi aset	Bagian Aset	data aset dan BMD	Web
		SIMPPD	Aplikasi laporan realisasi fisik	Bappeda	Data laporan realisasi fisik	Web

No	Nama SOPD	Aplikasi				
		Nama	Deskripsi	Kepemilikan	Data yg dikelola	Teknologi
		SIMONEV	aplikasi laporan realisasi keuangan	Bappeda	Data laporan realisasi keuangan	Web
		SIMPEG	Aplikasi kepegawaian	BKPP	Data pegawai	Web
		SIMTLP	aplikasi tindak lanjut pemeriksaan	Inspektorat	data tindak lanjut pemeriksaan	Web
		SAKIP	aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Inspektorat	data akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Web
		SIPD	aplikasi sistem informasi pembangunan daerah	Bappeda	Data informasi pembangunan daerah	Web
36	Kecamatan Bukit Batu	SIMDA	-	-	-	-
37	Kecamatan Rakumpit	-	-	-	-	-

Lampiran 4. Regulasi/Kebijakan terkait TI yang dimiliki oleh SOPD

No	NAMA SOPD	JENIS KEBIJAKAN/REGULASI
1.	<b>SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/193/2018 Tentang Pembentukan TIM Pengelola Aplikasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Operator Pengelola Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018.</li> <li>b. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/256/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Operator Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018.</li> <li>c. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/172/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018.</li> </ul>
2.	<b>INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/261/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Operator Pengelola Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2017, tanggal 27 Mei 2017;</li> <li>b. Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/02.a/I.c/2017/INSP Tentang Pembentukan Tim Admin Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Pemeriksaan (SIMTLP)/ E-Follow Up Inspektorat Kota Palangka Raya.</li> </ul>
3.	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/172/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018</li> <li>b. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/341/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018</li> <li>c. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/173/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018</li> </ul>
4.	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK . Walikota Palangka Raya Nomor 188.45 /256/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dan Operator Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya , tanggal 14 Mei 2018</li> </ul>
5.	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.</li> </ul>

No	NAMA SOPD	JENIS KEBIJAKAN/REGULASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 900/10.d/DKPS/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Pembentukan TIM Pengelola Website dan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan Kota Palangka Raya Tahun 2018.</li> <li>c. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 470/217/DKPS/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penetapan TIM Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kota Palangka Raya Tahun 2018.</li> </ul>
6.	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA</b>	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrasi nama Domain Intansi Penyelenggara Negara
7.	<b>DINAS TENAGA KERJA KOTA PALANGKA RAYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 13 Tahun 2003 dan Permennaker no 39 tahun 2016 tentang bursa kerja online</li> <li>b. SK Walikota Palangka Raya ttg Admin Website SOPD</li> </ul>
8.	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007.</li> <li>b. Undang-undang No. 11 Tahun 2008</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>
9.	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	a. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Nomor 503.01/437/IX/2017 Tentang Pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
10.	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 440/20.1/A-1/Sekrt/I/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Domain Sub Domain (palangkaraya.go.id) pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2018, tanggal 08 Januari 2018</li> <li>b. SK Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 440/06.1/A-1/Sekrt/I/2018 tentang Petugas Data Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018</li> <li>c. SK Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor :440/14.1/Sekrt/I/2018 tentang Petugas Operator Aplikasi Penunjang Proses Perencanaan, Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, tanggal 05 januari 2018</li> <li>d. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/42/2018 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, tanggal 2 Januari 2018</li> <li>e. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/193/2018 tentang Pembentukan TIM pengelola aplikasi evaluasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>

No	NAMA SOPD	JENIS KEBIJAKAN/REGULASI
		<p>dan Operator Pengelola Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018, tanggal 8 Maret 2018</p> <p>f. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/172/2018 tentang Pembentukan TIM Pengelola Data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018</p> <p>g. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/341/2018 tentang Pembentukan TIM Pengelola Data Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018</p> <p>h. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/173/2018 tentang Pembentukan TIM Pengelola Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018</p> <p>i. SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya nomor : 440/345/Sekrt/I/2018 tentang Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018</p>
11	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<p>a. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/173/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018.</p> <p>b. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/42/2018 Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018.</p> <p>c. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/ 70/ 2018 Tentang Pejabat Pengelola Uang dan Barang Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018.</p> <p>d. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/172/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018.</p> <p>e. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188. 45/193/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Operator Pengelola Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018.</p> <p>f. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/256/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Operator Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018.</p>
12.	<b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA</b>	<p>a. SK Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/256/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Operator Pengelolaan Aplikasi Sistem Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018</p>



No	NAMA SOPD	JENIS KEBIJAKAN/REGULASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. SK Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 870/05.08/Sekt/BPPRD/I/2017 Tentang Pengelola Website Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya</li> <li>c. SK Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 870/0150.30/Sekt/BPPRD/I/2018 tentang Penunjukan Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPATDA)</li> <li>d. SK Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya nomor : 870/0022.09/Bid.IV/BPPRD/I/2018 tentang Operator Console Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya</li> <li>e. SK Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya nomor : 870/0023.09/Bid.IV/BPPRD/I/2018 tentang Penetapan Operator Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP PBB-P2) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya</li> </ul>
13.	<b>KECAMATAN PAHANDUT</b>	SK Walikota Nomor: 188.45/376/2017 tentang Penunjukan Admin Pengelola Domain dan Sub Domain ( <a href="http://www.kec-pahandut.palangkaraya.go.id">www.kec-pahandut.palangkaraya.go.id</a> ) pada Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

**Lampiran 4. Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya**

No	Nama SOPD	Jumlah Pegawai		Staff bidang TIK	Tugas di bidang TIK
		PNS	Non-PNS		
1	Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	124	178	Tidak ada	-
2	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	33	41	Tidak ada	-
3	Inspektorat Kota Palangka Raya	38	21	Tidak ada	-
4	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	84	49	Ada	Data Dapodik
5	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	77	41	Tidak ada	-
6	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	43	5	Tidak ada	-
7	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	54	111	Ada	Menginput database
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya	49	23	Ada	Operator website dan operator PPID
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	61	60	tidak ada	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya	195	420	Tidak ada	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya	29	8	Tidak ada	-
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya	95	23	Tidak ada	-
13	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	44	10	Tidak ada	-
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya	11	15	Ada	Memelihara website
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya	32	8	Tidak ada	-
16	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	50	9	Tidak ada	-
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	45	12	Tidak ada	-
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	37	57	Tidak ada	-
19	Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Palangka Raya	30	11	Tidak ada	-

No	Nama SOPD	Jumlah Pegawai		Staff bidang TIK	Tugas di bidang TIK
		PNS	Non-PNS		
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	44	10	Ada	Pemeliharaan jaringan, website, maintenance software dan hardware
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya	55	68	Tidak ada	-
22	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	50	13	Tidak ada	-
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya	39	40	Tidak ada	-
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya	45	13	Ada	Pengelola SIM Kepegawaian
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	48	43	Tidak ada	-
26	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	58	48	Ada	Mengelola server, Mengelola aplikasi pajak daerah, maintenance server (operator console)
27	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	27	25	Tidak ada	-
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya	48	11	Ada	Sebagai admin dan operator aplikasi
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	45	21	Tidak ada	-
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	29	9	Ada	Mengelola website, mengelola email
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	60	133	Ada	Menjalankan aplikasi khusus; mengoperasikan komputer; mengelola website
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota Palangka Raya	70	122	Tidak ada	-
33	Kecamatan Jekan Raya	22	14	Tidak ada	-

No	Nama SOPD	Jumlah Pegawai		Staff bidang TIK	Tugas di bidang TIK
		PNS	Non-PNS		
34	Kecamatan Pahandut	32	5	Ada	Operator website
35	Kecamatan Sabangau	58	8	Tidak ada	0
36	Kecamatan Bukit Batu	14	9	Tidak ada	-
37	Kecamatan Rakumpit	13	3	Tidak ada	-

**Lampiran 5. Kondisi Kemampuan TIK Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya**

No	Nama SOPD	Keahlian TIK													
		Mengoperasikan Komputer		Membuat Aplikasi		Membuat Website		Memelihara Website		Konfigurasi Jaringan		Perbaikan Hardware		Manajemen TIK	
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS
1	Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	26	13	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
3	Inspektorat Kota Palangka Raya	4	6	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0
4	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	46	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	77	41	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0
6	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	38	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	2	4	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya	36	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	58	53	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Nama SOPD	Keahlian TIK													
		Mengoperasikan Komputer		Membuat Aplikasi		Membuat Website		Memelihara Website		Konfigurasi Jaringan		Perbaikan Hardware		Manajemen TIK	
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya	19	8	0	1	0	1	1	2	0	1	0	2	0	0
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya	12	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	44	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya	41	11	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya	33	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	14	6	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	26	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Nama SOPD	Keahlian TIK													
		Mengoperasikan Komputer		Membuat Aplikasi		Membuat Website		Memelihara Website		Konfigurasi Jaringan		Perbaikan Hardware		Manajemen TIK	
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	44	10	7	0	9	0	10	0	5	0	5	0	1	0
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	16	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya			0	0										
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya	45	10	1	1	1	0	2	2	1	1	0	0	0	0
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	48	37	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
26	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	50	45	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
27	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	25	25	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

No	Nama SOPD	Keahlian TIK													
		Mengoperasikan Komputer		Membuat Aplikasi		Membuat Website		Memelihara Website		Konfigurasi Jaringan		Perbaikan Hardware		Manajemen TIK	
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya	48	10	3	0	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	12	6	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	9	9	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota Palangka Raya	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kecamatan Jekan Raya	12	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1
34	Kecamatan Pahandut	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kecamatan Sabangau	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kecamatan Bukit Batu	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kecamatan Rakumpit	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Lampiran 6. Provider Internet di SOPD-SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya**

N o	Nama SOPD	ISP	Produk	Bandwith
1	Sekretariat Daerah	Telkom	Telkom	
2	Sekretariat DPRD	Icon+ dan Telkom	Icon+ dan Telkom	Icon+ = 10 mbps; Telkom = 20 mbps
3	Inspektorat	Diskominfo	Diskominfo	-
4	Dinas Pendidikan	Telkom	Telkom	
5	Dinas Kesehatan	Telkom	Telkom	-
6	Dinas Sosial	Telkom	Telkom	2Mbps
7	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya	Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya	-
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Telkom	Telkom	10mbps
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Telkom	Speedy dan Astina Lite	Speedy = 0.4 mbps; Astina Lite= 0.7 mbps
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Telkom	Telkom	
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Telkom	Telkom	10mbps
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Telkom	ASTINet;	20mbps
13	Dinas Perikanan	Telkom	Telkom	20mbps
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Icon+; Telkom	Icon+; Telkom	-
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Telkom	Telkom	-
16	Dinas Lingkungan Hidup	Telkom	Telkom	-
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Telkom	Telkom	20mbps

N o	Nama SOPD	ISP	Produk	Bandwith
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Telkom	ASTINet;	1Mbps
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Icon+	Icon+	50mbps dedicated; 300mbps broadband
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-
22	Dinas Tenaga Kerja	Telkom	Telkom	1mbps
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Telkom	Telkom	2MB
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Telkom	ASTINet; Telkom	10mbps
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fiberhome; Jaringan Diskominfo	Fiberhome; Jaringan Diskominfo	10mbps
26	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Icon+	Icon+	40mbps
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	Telkom	Speedy; ASTINet	Speedy = 2.5 mbps; ASTINet= 8 mbps
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Diskominfo	Diskominfo	-
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Telkom	Telkom	-
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Telkom	Telkom	10mbps
31	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	Telkom	Telkom	30mbps
33	Kecamatan Jekan Raya	Telkom	Telkom	10mbps
34	Kecamatan Pahandut	Telkom	Telkom	10mbps
35	Kecamatan Sabangau	Telkom	Telkom	30mbps
36	Kecamatan Bukit Batu	Telkom	Telkom	10mbps
37	Kecamatan Rakumpit	-	-	-

**Lampiran 7. Kondisi Eksisting Perangkat Keras di tiap SOPD**

No	Nama SOPD	Jumlah Perangkat Keras						
		Komputer	Laptop	Komputer/Laptop yang dapat terhubung internet	Printer	Scanner	CCTV	Komputer Server
1	Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	68	9	0	47	0	0	2
2	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	8	32	34	32	29	15	0
3	Inspektorat Kota Palangka Raya	15	20	10	12	1	4	0
4	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	5	26	29	16	2	8	2
5	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	60	64	4	33	1	0	0
6	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	8	13	14	17	3	0	0
7	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	7	25	18	26	26	6	0
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya	4	10	10	10	0	2	0
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	12	10	15	19	0	0	0
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya	10	35	25	35	1	8	0
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya	4	4	7	7	0	0	0
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya	19	19	12	21	1	1	0

No	Nama SOPD	Jumlah Perangkat Keras						
		Komputer	Laptop	Komputer/Laptop yang dapat terhubung internet	Printer	Scanner	CCTV	Komputer Server
13	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	20	30	15	17	1	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya	25	25	13	16	8	6	0
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya	4	0	5	1	0	0	0
16	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	4	10	16	16	10	0	0
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	17	60	47	43	3	2	3
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	12	1	9	6	2	0	0
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	2	8	6	6	6	0	0
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	11	29	18	10	0	0	3
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya	7	29	22	14	0	16	0
22	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	4	15	14	10	1	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya	17	17	38	68	13	18	1
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya	23	23	25	29	4	10	0
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	28	51	30	37	14	6	0

No	Nama SOPD	Jumlah Perangkat Keras						
		Komputer	Laptop	Komputer/Laptop yang dapat terhubung internet	Printer	Scanner	CCTV	Komputer Server
26	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	28	81	53	51	1	5	4
27	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	9	16	7	22	0	1	0
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya	65	60	18	66	1	12	0
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	7	0	5	4	0	0	0
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	10	1	8	13	0	2	0
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	2	0	12	9	0	4	0
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota Palangka Raya	12	9	21	8	1	4	0
33	Kecamatan Jekan Raya	5	9	11	9	4	4	0
34	Kecamatan Pahandut	2	8	13	13	0	0	0
35	Kecamatan Sabangau	7	10	3	5	5	1	0
36	Kecamatan Bukit Batu	2	5	5	6	0	0	0
37	Kecamatan Rakumpit	6	0	3	4	0	0	0